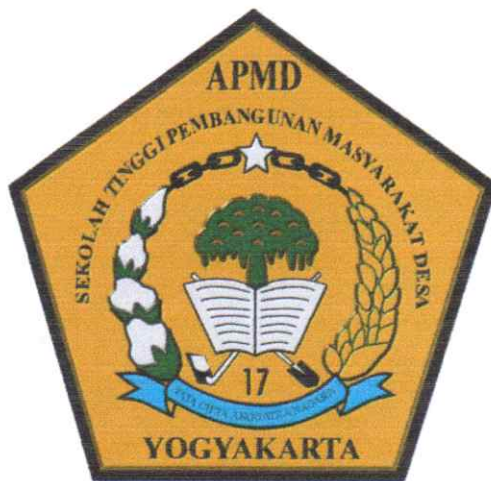


**SKRIPSI**

**PENGUNAAN DANA DESA 2024 UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN  
DASAR DI KALURAHAN GUWOSARI**



Disusun oleh :

RAY PRATAMA UMBU KORA DJAGA UMA

21520043

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA**

**2025**



## **HALAMAN JUDUL**

**PENGUNAAN DANA DESA 2024 UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN  
DASAR DI KALURAHAN GUWOSARI**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)  
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA  
2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat: Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

### TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si

Ketua Penguji / Pembimbing

Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A.

Penguji Samping I

Minardi, S.IP., M.Sc

Penguji Samping II

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

(Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A.)



## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ray Pratama Uumbu Kora Djaga Uma

Nim : 21520043

Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Penggunaan dana desa 2024 untuk pemenuhan kebutuhan dasar di Kalurahan Guwosari**" adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 juli 2025

Yang



**Ray pratama umbu kora djaga uma**  
**21520043**



**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Ray pratama umbu kora djaga uma  
NIM : 21520043  
Telp : 082146522137  
Email : [raykoraiki@gmail.com](mailto:raykoraiki@gmail.com)  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi  
Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"  
Yogyakarta.

Dengan ini memberikan izin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

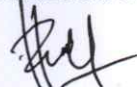
**"Penggunaan dana desa 2024 untuk pemenuhan kebutuhan dasar di Kalurahan Guwosari"**

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 16 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan



**Ray paratama umbu kora djaga uma**  
**21520043**

## **MOTTO**

“Sebab Aku Ingin Mengetahui Rancangan Rancangan Apa Yang Ada Pada Ku Mengenai Kamu, Demikian Firman Tuhan Yaitu Rancangan Damai Sejahtera Dan Bukan Rancangan Kecelakaan ,Untuk Memberikan Kepadamu Hari Depan Yang Penuh Harapan”

(Yeremia 29 : 11)

“Tidak Ada Jalan Pintas Menuju Kesuksesan Yang Sejati”

(John Wooden)

“Pengetahuan Adalah Kunci Kesuksesan Yang Tak Ternilai”

(Albert Einstein)

“Tidak Ada Kata Terlambat Untuk Kita Yang Mau Berusaha Jadi Teruslah Berproses Sampe Titik Akhir Penghabisan Biar Gak Di Katain Legend Kampus”

-Zexy-

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang maha esa atas berkat yang selama ini tuhan berikan kepada saya,dalam proses awal kuliah hingga tiba pada titik ini dimana saya telah menyelesaikan perkuliahan saya dengan baik untuk itu saya akan mempersembahkan skripsi ini untuk orang orang yang sangat saya cintai dan mempunyai kontribusi besar dalam proses perkuliahan hingga skripsi ini: Terimakasih Tuhan Yesus ,terimakasih banyak sudah mengantarkan saya pada titik ini tidak ada kata yang bisa saya ucapkan tapi saya yakin dan percaya Tuhan selalu ada untuk saya dan melindungi saya sampai di titik ini ,perjalanan masih panjang tolong jaga dan lindungi saya, sekali lagi terimakasih Tuhan Yesus.

1. Terimakasih untuk kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi Bpk Daniel Umbu Kaledi Kapeta dan Ibu Yanti Rambu Guna yang selalu ada dan suport saya dan juga doa buat saya dari awal perkuliahan hingga pengerjaan skripsi ini,terimakasih banyak mungkin ini tidak seberapa tapi saya sangat bangga memiliki bapak mama loveyou.
2. Terimakasih untuk Kaka sulung Iis putri selaku donatur handal di saat bos lagi sibuk terimakasih banyak atas dukungan dedikasi selama ini untuk saya,tak lupa juga buat adik saya Cheyza dan Randy terimakasih atas doa dan dukungan selama ini.
3. Terimakasih untuk keluarga besar Ngadujiangu Bapa viona sekeluarga, Bapa glori sekeluarga dan juga Bp aldis sekeluarga dan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang turut ambil bagian dalam proses perkuliahan ini terimakasih banyak.
4. Terimakasih juga buat Organisasi SMI yang di mana saya bisa banyak belajar terkait dinamika sosial yang ada pada pemerintahan saat ini dan sedikit mendapatkan pengetahuan terimakasih banyak.
5. Terimakasih banyak juga untuk Olivera santiyani Newing yang selalu ada dan temani saya di jogja dalam suka maupun duka dan juga membantu saya dalam hal pengerjaan skripsi ini terimakasih banyak sayang atas doa dan dukungan selama ini.

6. Terimakasih juga buat teman teman terdekat saya yang selalu ada dan setia menemani di jogja ,Alfand ,Glen ,Arya pinati ,Puntha dewa,Andika ,Umbu irfan,Yorgin ,Ariel pingge,ibeng .Terimakasih banyak angua semoga nyusul semua.
7. Terimakasih juga untuk patner bisnis Glen yang sudah sangat membantu saya di jogja dalam dunia bisnis terimakasih angua sudah banyak doa dalam hal pengerjaan skripsi sampe dapat gelar.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat yang diberikan sehingga penulisan skripsi dengan judul “Penggunaan Dana Desa 2024 Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kalurahan Guwosari “ dapat terselesaikan dengan baik dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjan Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan banyak pihak baik dari secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas segala dukungan, bantuan, bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis, khususnya kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ”APMD” Yogyakarta sebagai tempat untuk menimba ilmu dan pengalaman akademik.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto M.Si selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ”APMD” Yogyakarta
3. Bapak Dr. Gregorius Shadan, S.IP.,M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Ibu Dra. B. Hari Saptaning Tyas,M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membantu serta membimbing saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada Dosen penguji Bapak Dr. Gregorius Shadan, S.IP.,M.A dan Minardi,S.IP.,M.Sc
6. Bapak, Ibu Dosen dan semua civitas akademik Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ”APMD” Yogyakarta. Terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang diberikan kepada saya selama menuntut ilmu dikampus ini.

7. Pemerintah Kelurahan Guwosari dan Masyarakat Guwosari sebagai tempat penelitian skripsi yang telah memberikan informasi dan data sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam isi maupun teknik penyajian. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik yang solutif guna perbaikan selanjutnya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 16 Juli 2025

Penulis

**Ray Pratama Umbu Kora Djaga Uma**  
**21520043**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN KARYA ILMIAH UNTUK.....	iv
KEPENTINGAN AKADEMIK.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	x
INTISARI.....	xii
BAB 1 .....	xii
PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah .....	4
3. Fokus Penelitian .....	5
4. Tujuan Penelitian.....	5
5. Manfaat Penelitian .....	5
6. Literatur Review.....	6
7. Kerangka konseptual.....	11
a. Dana Desa .....	11
b. Kebutuhan Dasar.....	14
8. Metode penelitian.....	16
a. Jenis penelitian .....	17
b. Objek penelitian .....	18
c. Subjek penelitian.....	18
d. Teknik pengumpulan data.....	19
e. Teknik analisis data.....	22
BAB II.....	25

PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR DI KALURAHAN GUWOSARI .....	25
1.    Kebutuhan Dasar Kalurahan guwosari.....	26
a.    Pendidikan.....	26
b.    Kesehatan .....	26
c.    Ekonomi .....	27
d.    Infrastruktur.....	27
2.    Sejarah Kalurahan Guwosari.....	29
3.    Letak Geografis Kalurahan Guwosari.....	29
4.    Kondisi geografis kalurahan guwosari.....	30
5.    Kondisi Demografi Desa.....	33
6.    Kondisi Sosial dan Ekonomi.....	33
A.    Kondisi sosial.....	33
B.    Kondisi Ekonomi .....	34
7.    Struktur organisasi pemerintah kalurahan guwosari .....	36
8.    APBkal Guwosari dan Dana Desa .....	39
9.    Potensi dan Inovasi Desa .....	53
BAB III .....	55
PENGUNAAN DANA DESA 2024 UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN	
DASAR DI KALURAHAN GUWOSARI .....	55
A.    Penggunaan Dana Desa Untuk Kebutuhan Dasar Masyarakat Pada Bidang	
Kesehatan .....	56
B.    Penggunaan Dana Desa Untuk Kebutuhan Dasar Masyarakat Pada Bidang	
Penanggulangan Masyarakat Miskin.....	61
BAB IV .....	74
PENUTUP.....	74
A.    Kesimpulan .....	74
B.    Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	77
PANDUAN WAWANCARA .....	78
LAMPIRAN.....	79

## INTISARI

Penelitian ini mengangkat permasalahan penggunaan Dana Desa tahun 2024 dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kalurahan Guwosari, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana dana desa dimanfaatkan dalam sektor kesehatan dan penanggulangan kemiskinan, mengingat kedua aspek ini menjadi fokus prioritas berdasarkan kondisi sosial-ekonomi kalurahan guwosari kapanewon pajangan. Tantangan yang dihadapi Kalurahan guwosari meliputi keterbatasan fasilitas kesehatan, tingginya angka masyarakat miskin, serta perlunya penguatan kapasitas pemerintah desa dalam tata kelola yang partisipatif dan transparan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap perangkat desa, kader kesehatan, karang taruna, dan penerima manfaat. Fokus penelitian ini adalah melihat sejauh mana program-program Dana Desa, seperti posyandu, penyuluhan kesehatan, bantuan langsung tunai (BLT), dan program pemberdayaan ekonomi mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi data untuk menarik kesimpulan yang valid.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa 2024 telah berkontribusi terhadap peningkatan akses layanan kesehatan dan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin di Kalurahan Guwosari. Program seperti penyediaan makanan tambahan balita, kegiatan posyandu, renovasi jamban, serta BLT dinilai tepat sasaran oleh masyarakat. Namun demikian, ditemukan pula beberapa kendala seperti keterbatasan tenaga medis dan kebutuhan peningkatan transparansi pengelolaan dana. Penelitian ini bertujuan untuk penguatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kapasitas perangkat desa, serta evaluasi berkala agar Dana Desa benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

**Kata kunci : Dana desa ,Kebutuhan dasar , Kesehatan masyarakat , Penanggulangan kemiskinan**

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan Dana Desa menjadi salah satu strategi yang diterapkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dengan fokus utama pada pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar merupakan aspek fundamental dalam pembangunan desa yang mencakup kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, serta perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk mengatasi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, dengan tujuan menciptakan desa yang mandiri dan berdaya saing.

Dalam konteks pembangunan desa, pemanfaatan dana desa tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup sektor-sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Berbagai program dan kegiatan yang didanai melalui dana desa diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Dengan demikian, dana desa menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing.

Dana Desa merupakan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk desa dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.07/2020, dana desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik,

mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, serta mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. Dana desa menjadi salah satu instrumen utama untuk mewujudkan Nawacita, khususnya dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Menurut Kusnadi et al. (2020), dana desa juga merupakan alat untuk mendorong keberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan. Hal ini sejalan dengan pandangan Sutanto (2018) yang menyatakan bahwa dana desa bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan kaum muda.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PERMENDES) Nomor 7 Tahun 2023, prioritas penggunaan Dana Desa mencakup pemenuhan kebutuhan dasar dengan fokus pada empat aspek utama, yaitu pencegahan dan penurunan stunting, peningkatan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa, penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, serta pengurangan beban pengeluaran bagi masyarakat miskin. Fokus utama dari prioritas ini adalah memastikan bahwa masyarakat desa memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, memperoleh gizi yang cukup, serta mendapatkan bantuan ekonomi yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Dalam konteks Kalurahan Guwosari, dari empat aspek pemenuhan kebutuhan dasar yang disebutkan dalam PERMENDES 2023, terdapat dua



aspek utama yang menjadi perhatian, yaitu perluasan akses layanan kesehatan dan penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin. Upaya peningkatan akses layanan kesehatan dilakukan melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih memadai, peningkatan tenaga medis, serta penyuluhan kesehatan bagi masyarakat. Sementara itu, dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Dana Desa digunakan untuk berbagai program bantuan sosial serta pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

Sektor kesehatan di Kalurahan Guwosari masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, kurangnya tenaga medis, serta minimnya fasilitas kesehatan yang memadai. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan dalam penanganan masalah kesehatan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Oleh karena itu, Dana Desa berperan penting dalam memperkuat sistem kesehatan di tingkat desa, termasuk melalui pembangunan dan renovasi fasilitas kesehatan, program imunisasi, serta penyuluhan gizi guna mencegah dan menurunkan angka stunting.

Selain kesehatan, penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin menjadi perhatian utama dalam pemanfaatan Dana Desa di Kalurahan Guwosari. Tingginya harga kebutuhan pokok serta keterbatasan lapangan pekerjaan menjadi faktor yang menyebabkan banyak keluarga berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Melalui Dana Desa, berbagai program bantuan sosial seperti subsidi bagi keluarga miskin, pemberian bantuan langsung tunai (BLT), serta program pemberdayaan ekonomi berbasis desa telah diimplementasikan

guna meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bergantung pada bantuan dari luar desa secara terus-menerus.

Penelitian ini berfokus pada aspek *Governability* dalam pemerintahan desa, yang merujuk pada kemampuan desa dalam mengelola dirinya sendiri serta mengatur masyarakat di wilayahnya. Piore dan Peters mendefinisikan *Governability* sebagai hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat yang saling bergantung satu sama lain. Hubungan ini terbentuk melalui regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah desa dapat mengelola berbagai kebutuhan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dianalisis bagaimana penggunaan Dana Desa 2024 dalam pemenuhan kebutuhan dasar di Kalurahan Guwosari, serta sejauh mana kebijakan ini berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi tantangan dalam implementasi kebijakan Dana Desa dan mencari solusi untuk meningkatkan efektivitasnya. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi kebijakan yang lebih tepat guna, sehingga Dana Desa benar-benar dapat menjadi instrumen yang optimal dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan Dana Desa 2024 dalam memenuhi kebutuhan dasar di Kalurahan Guwosari?

### **3. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada analisis dana desa dan pemanfaatan Dana Desa 2024 di Kalurahan Guwosari dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar tersebut mencakup dua aspek utama, yaitu:

1. Penggunaan Dana Desa Untuk Kebutuhan Dasar Masyarakat Pada Bidang Kesehatan yang terdiri dari
  - a. Penyediaan makanan tambahan untuk balita dan lansia
  - b. Kegiatan posyandu
  - c. Renovasi jamban
  - d. Penyuluhan kesehatan dan Rembuk stunting
2. Penggunaan Dana Desa Untuk Kebutuhan Dasar Masyarakat Pada Bidang Penanggulangan kemiskinan.
  - a. Bantuan langsung tunai BLT
  - b. Program pemberdayaan ekonomi mencakup ternak kambing dan sapi
  - c. Program KWT untuk wanita tani dalam pemberian bibit sayur,cabe,tomat ,jeruk nipis dan lainnya
  - d. Perbaikan infastruktur untuk masyarakat yang membutuhkan

### **4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan dana desa 2024 di Kalurahan Guwosari dalam Bidang kesehatan dan Bidang penanggulangan kemiskinan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

### **5. Manfaat Penelitian**

**a. Manfaat Akademis:**

Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi dalam kajian kebijakan Dana Desa.

**b. Manfaat Praktis:**

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa guna memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

**6. Literatur Review**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan mengkaji berbagai referensi akademik yang membahas penggunaan Dana Desa dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah Kalurahan memiliki peran strategis dalam mengelola Dana Desa secara efektif guna meningkatkan kesejahteraan warga. Governabilitas pemerintah kalurahan berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan Dana Desa, yang harus dilakukan dengan prinsip rekognisi dan subsidiaritas.

Tata kelola birokrasi yang baik serta partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor utama dalam memastikan penggunaan Dana Desa yang transparan dan tepat sasaran. Oleh karena itu, penelitian ini akan merujuk pada berbagai studi terdahulu yang membahas pengelolaan Dana Desa, implementasi kebijakan di tingkat desa, serta dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji berbagai penelitian sebelumnya, termasuk jurnal dan hasil riset lainnya, sebagai bahan

perbandingan serta referensi yang relevan dengan topik penelitian. Adapun penelitian-penelitian tersebut meliputi:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan Nasir dan Ghazali, jurnal pengembangan masyarakat islam, volume 15, Nomor 2 (2022) dengan judul Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa Melalui Pengembangan Masyarakat Islam Di Kabupaten Pringsewu Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan mengambil latar di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, subyek dalam penelitian ini adalah Masyarakat di Kecamatan Gadingrejo yang terdiri dari 23 Pekon dengan jumlah penduduk 38.222 jiwa dengan menggunakan teknik Purposive Sampling sehingga terdapat kriteria dalam menentukan sampel.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk mengolah data yang diperoleh, digunakan metode deskriptif analisis guna menghimpun informasi aktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Dana Desa memberikan dampak positif bagi masyarakat, yang tercermin dari kolaborasi antara pemerintah dan warga dalam pembangunan sarana serta prasarana desa, seperti pembangunan jalan, jembatan, gorong-gorong, serta perbaikan fasilitas desa. Partisipasi masyarakat terlihat dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan. Selain itu, program pemberdayaan juga berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Gadingrejo.

*Kedua*, penelitian Wea et al, Journal Of Business Finance And Economic, vol.5, Nomor 2 (2024) mengenai penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan

masyarakat di Desa Wolowea Timur, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, juga menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan yang dilakukan, seperti bantuan bibit tanaman, bibit kakao, dan ayam ternak, telah membantu meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa peningkatan kesejahteraan masih terbatas karena adanya kendala seperti perubahan hasil panen yang tidak menentu dan kerusakan tanaman. Hasil penelitian tersebut menjadi referensi penting dalam memahami bagaimana Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

*Ketiga*, Penelitian Mardhotillah et al, Jurnal Ilmu Administrasi, Volume 15, Nomor 1 (2024) bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dalam membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin di Desa Citali, Kabupaten Sumedang. Dengan menggunakan metode campuran (mixed methods) dan pendekatan Logical Framework Analysis, penelitian ini menganalisis sejauh mana BLT Dana Desa mampu mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan BLT Dana Desa masih belum efektif dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin. Permasalahan utama yang ditemukan adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, jumlah bantuan yang belum memadai, serta minimnya keterlibatan masyarakat miskin dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Untuk meningkatkan efektivitas BLT Dana Desa, penelitian ini merekomendasikan

penyesuaian nominal bantuan, peningkatan transparansi tata kelola, serta intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat sebelum program dijalankan.

*Keempat*, Penelitian Adzam et al, Public Service And Governance Journal, Volume 5, Nomor 2 (2024) membahas peran kebijakan fiskal dalam mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan Dana Desa di Indonesia. Dengan menggunakan metode studi literatur dan data sekunder dari Badan Pusat Statistik serta Kementerian Keuangan, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan serta implementasi kebijakan fiskal dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan alokasi Dana Desa memiliki dampak positif dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program pemberdayaan yang dibiayai oleh Dana Desa terbukti mampu memperbaiki status desa serta mengurangi jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas program.

*Kelima*, Penelitian Pratama et al, Journal Progres Ekonomi Pembangunan, Volume 9, Nomor 2 (2024) menganalisis pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, dengan meninjau aspek perencanaan, pelaksanaan, akuntabilitas, serta pencapaian target kinerja program. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini mewawancarai aparat desa dan masyarakat serta menganalisis data sekunder untuk mengevaluasi penggunaan Dana Desa.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di tiga desa yang diteliti telah berjalan efektif, terbukti dari perencanaan program yang sesuai dengan visi-misi desa, pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran, serta sistem akuntansi dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar keuangan desa. Capaian kinerja dan anggaran program pembangunan mencapai lebih dari 95%, yang berdampak positif pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur desa, serta pengembangan usaha ekonomi produktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa pendapat yang sejalan dengan argumen dalam penelitian ini. Misalnya, penelitian Pratama et al. (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa berkontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pembangunan ekonomi desa. Selain itu, penelitian Mardhotillah et al. (2024) mengungkapkan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa masih menghadapi tantangan dalam implementasinya, yang sejalan dengan fokus penelitian ini mengenai optimalisasi penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, berbagai studi sebelumnya mendukung bahwa pengelolaan Dana Desa yang baik dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, meskipun masih terdapat kendala yang perlu diselesaikan.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan studi sebelumnya terletak pada cakupan analisis dan pendekatan yang digunakan. Penelitian ini berfokus pada penggunaan Dana Desa dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Kalurahan Guwaosari, yang mencakup kesehatan, dan penanggulangan

masyarakat miskin, sedangkan sebagian besar penelitian terdahulu hanya membahas satu aspek spesifik seperti pelayanan kesehatan atau program bantuan langsung tunai (BLT). Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan governability yang menitikberatkan pada tata kelola, transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa, sementara penelitian lain lebih banyak menggunakan pendekatan efektivitas kebijakan atau ekonomi pembangunan.

## **7. Kerangka konseptual**

### **a. Dana Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa memberikan kesempatan bagi desa untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dana ini dianggarkan setiap tahun dalam APBN dan menjadi salah satu sumber pendapatan desa (Kementerian Keuangan, 2017). Kebijakan ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa, sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, semakin memperkuat peran Dana Desa dalam pembangunan desa. Pasal 72 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan bahwa alokasi Dana Desa berasal dari belanja pusat melalui dana transfer daerah dengan prinsip keadilan dan dapat ditingkatkan sesuai dengan kondisi keuangan negara. Selain itu, Pasal 72A menegaskan bahwa Dana Desa harus dikelola berdasarkan prioritas pembangunan desa, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan

masyarakat, pembinaan sosial, serta pemberdayaan ekonomi guna menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dana Desa sendiri bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan untuk desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Sejak mulai digulirkan pada tahun 2015, dana ini bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat (Marekan, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019).

Tujuan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 meliputi:

1. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum (Pasal 4 huruf f).
2. Mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dengan memajukan perekonomian masyarakat desa (Pasal 4 huruf h).
3. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional (Pasal 4 huruf g).
4. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Pasal 4 huruf i).

Penyaluran Dana Desa dilakukan langsung dari APBN kepada Pemerintah Desa. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas serta memastikan

efektivitas penggunaan Dana Desa, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa sebelum dana tersebut dapat disalurkan.

Ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa diatur dalam Pasal 72 ayat (7) UU Nomor 3 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa jika suatu kabupaten/kota tidak mengalokasikan Dana Desa sebagaimana yang telah ditetapkan, maka pemerintah pusat berhak menunda atau memotong dana perimbangan yang seharusnya disalurkan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Dana Desa benar-benar diterima dan dimanfaatkan oleh desa sebagai haknya dalam pembangunan.

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2024, pemanfaatan Dana Desa ditentukan berdasarkan prioritas kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa (Pasal 74 ayat 1). Prioritas ini mencakup kebutuhan dasar, pelayanan publik, lingkungan, serta program pemberdayaan masyarakat desa (Pasal 74 ayat 3). Dalam hal pengelolaan keuangan desa, kepala desa juga diberikan kewenangan untuk melimpahkan sebagian tugasnya kepada perangkat desa yang ditunjuk (Pasal 72 ayat 6).

Pasal 78 UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa menegaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup, yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur desa, serta pengembangan potensi ekonomi lokal. Selain itu, pembangunan desa harus mengedepankan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong sebagai nilai sosial utama dalam kehidupan masyarakat desa.

Selanjutnya, Pasal 79 ayat (2) mengatur bahwa perencanaan pembangunan desa harus disusun secara sistematis dalam dua tahapan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (8 tahun) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (1 tahun). Penyusunan ini bertujuan agar penggunaan Dana Desa lebih terarah, efektif, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui pengelolaan yang transparan dan efisien, Dana Desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan desa yang mandiri dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan nasional. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, Dana Desa difokuskan pada empat aspek utama, yakni pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur desa, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

#### **b. Kebutuhan Dasar**

Dalam penelitian ini, kebutuhan dasar mengacu pada elemen esensial yang harus dipenuhi agar masyarakat desa dapat menjalani kehidupan yang layak dan sejahtera. Pemenuhan kebutuhan dasar menjadi salah satu tujuan utama penggunaan Dana Desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta regulasi turunannya. Kebutuhan ini mencakup berbagai aspek penting yang mendukung kesejahteraan masyarakat desa, seperti layanan publik, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permendesa Nomor 7 Tahun 2023 tentang prioritas penggunaan dana desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar terdiri atas:

- a. Pencegahan dan penurunan *stunting* di desa
- b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa
- c. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
- d. Penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.

Keempat aspek tersebut menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan bahwa seluruh warga desa mendapatkan akses yang layak terhadap kebutuhan dasar mereka.

Menurut World Bank (2018), kebutuhan dasar didefinisikan sebagai seperangkat layanan dan barang yang diperlukan untuk menjamin kehidupan yang layak bagi individu, termasuk akses terhadap air bersih, sanitasi, kesehatan, pendidikan, pangan, dan perumahan. Dalam konteks pembangunan desa, pemenuhan kebutuhan dasar sering kali menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa, mengingat masih adanya kesenjangan pembangunan antara desa dan perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 7 Tahun 2023, dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar, terdapat beberapa program prioritas yang harus dijalankan oleh desa, di antaranya:

1. Pencegahan dan Penurunan Stunting – Melalui pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta penyediaan sarana air minum dan sanitasi yang layak.
2. Perluasan Akses Layanan Kesehatan – Melalui pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan desa seperti Posyandu, Polindes, dan Poskesdes, serta peningkatan akses tenaga medis ke wilayah desa.
3. Penguatan Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani – Melalui pemberdayaan petani dan peternak desa, penyediaan bibit unggul, pembangunan lumbung pangan desa, serta pengelolaan sumber daya pangan lokal.
4. Penurunan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin – Melalui program bantuan sosial, penyediaan jaminan sosial desa, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa, serta program padat karya tunai desa untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat kurang mampu.

Namun, berdasarkan profil Kalurahan Guwosari, hanya dua aspek pemenuhan kebutuhan dasar yang diimplementasikan, yaitu layanan kesehatan dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini disebabkan karena kedua aspek tersebut merupakan kebutuhan yang paling relevan sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Kalurahan Guwosari. Selain itu, kebijakan ini juga sejalan dengan rincian kebutuhan dasar dalam Permendesa Nomor 7 Tahun 2023, yang memungkinkan desa untuk menyesuaikan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan kondisi spesifik wilayahnya.

## **8. Metode penelitian**



Untuk mencapai tujuan penelitian ini, diperlukan metode yang mampu menggambarkan serta menganalisis penggunaan Dana Desa 2024 dalam pemenuhan kebutuhan dasar di Kalurahan Guwosari. Metode penelitian disusun secara sistematis guna memperoleh data yang akurat dan relevan dengan fokus penelitian. Tahapan dalam metode ini mencakup jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menginterpretasikan temuan penelitian.

**a. Jenis penelitian**

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan serta menggambarkan penggunaan Dana Desa 2024 dalam pemenuhan kebutuhan dasar di Kalurahan Guwosari. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Menurut Creswell (2014; 32) Sebagaimana dikutip oleh Arioen, R Dkk (2023; 12), mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau manusia. Ini berarti bahwa penelitian kualitatif mempelajari budaya suatu kelompok dan mengidentifikasi bagaimana perkembangan pola perilaku penduduk dari waktu ke waktu. Mengamati perilaku masyarakat dan keterlibatannya dalam kegiatan tersebut. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran rinci mengenai suatu fenomena. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena secara detail dan menyeluruh, dengan memahami makna yang terkait dengan subjek atau partisipan dalam situasi tertentu..

## **b. Objek penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah penggunaan Dana Desa 2024 di Kalurahan Guwaosari, khususnya dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan ekonomi.

## **c. Subjek penelitian**

Subjek Penelitian merupakan individu yang dijadikan sumber informasi dan sumber data oleh peneliti. Menurut Arikunto (2006:145) sebagaimana dikutip oleh Idris, H.T(2003) subjek penelitian adalah subjek penelitian yang dituju untuk diteliti oleh peneliti.

Subjek penelitian ini terdiri dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa di Kalurahan Guwaosari, antara lain:

**Table 1.1 informan penelitian di kalurahan guwosari**

No	Nama	Jabatan
1.	Nur Hidayah	Carik Kalurahan Guwosari
2.	Arwan	BPD kalurahan Guwosari
3.	Muhammad Fatkhurohmi	Dukuh
4.	Ahmad khalim	Dukuh
5.	Untoro	Rt
6.	Nur hayati	Kader posyandu
7.	Eka wahyuni	Pkk
8.	Wartini	Penerima manfaat
9.	Risky khoirul munna	Karang taruna
10.	Bima Gandhi wirawan	Karang taruna
11.	Riyanto	Dukuh

*Sumber : Data Primer*

#### **d. Teknik pengumpulan data**

Untuk mendapatkan data yang akurat dan mendalam, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### **a. Observasi**

Menurut Bungin (2007: 115), mengatakan bahwa observasi merupakan cara mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi dapat dipahami sebagai pengamatan langsung oleh peneliti terhadap kegiatan atau fenomena yang terjadi dalam situasi atau konteks tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung terhadap kondisi desa dan implementasi program Dana Desa, khususnya dalam aspek kesehatan dan penanggulangan kemiskinan yang menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan Permendesa Nomor 7 Tahun 2023. Observasi dalam aspek kesehatan mencakup akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, ketersediaan tenaga medis, fasilitas Posyandu dan Polindes, serta efektivitas program pencegahan dan penurunan stunting. Sementara itu, observasi dalam aspek penanggulangan kemiskinan mencakup distribusi dan efektivitas program bantuan sosial, pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, serta program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin di Kalurahan Guwosari.

Teknik observasi dilakukan dengan mengamati langsung kondisi lingkungan dan fasilitas yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti sarana kesehatan, lokasi posyandu, kondisi jamban, serta akses jalan menuju layanan publik. Hasil dari observasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas tersebut berada di tengah

pemukiman warga dan mudah dijangkau, meskipun ada beberapa catatan perbaikan seperti jambanisasi yang masih perlu ditingkatkan.

**b. Wawancara**

Moelong (2014: 86) menjelaskan bahwa wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu, yang melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara. Pewawancara bertugas mengajukan pertanyaan, sementara terwawancara memberikan jawaban. Dengan demikian, wawancara merupakan teknik pengumpulan data kualitatif yang mendalam dan kompleks. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan ruang lingkup penelitian sebagai acuan dalam berinteraksi dengan informan.

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara langsung, di mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada subjek penelitian. Wawancara dilakukan kepada perangkat kalurahan, seperti Carik (Sekretaris Desa), anggota BPD, serta masyarakat penerima manfaat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Dana Desa digunakan untuk berbagai program, di antaranya penyediaan makanan tambahan untuk lansia dan balita, penyemprotan nyamuk, kegiatan posyandu, renovasi jamban tidak layak, pelaksanaan penyuluhan rutin dan rembuk stunting. Selain itu, informan dari masyarakat juga menyampaikan bahwa bantuan sosial seperti BLT sangat membantu kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya pendidikan, dan selama ini dirasakan cukup lancar sejak beberapa tahun terakhir.

### c. Dokumentasi

Menurut Meoleng (2014: 160) analisis dokumentasi dapat digunakan karena merupakan sumber daya yang stabil, kaya dan mendorong serta sifatnya alamiah sesuai dengan konteks lahiriah tersebut. Dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumen-dokumen tertulis, arsip, catatan lapangan, dan sebagainya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan terdiri dari dua jenis utama. Pertama, laporan penggunaan Dana Desa tahun 2024 yang diperoleh dari Pemerintah Kalurahan Guwosari. Dokumen ini mencerminkan rincian alokasi dana, program yang dijalankan, serta kegiatan-kegiatan prioritas yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan dan penanggulangan kemiskinan.

Kedua, dokumentasi berupa **hasil wawancara langsung** dengan informan kunci, yaitu Carik (Sekretaris Kalurahan), anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPD), serta masyarakat penerima manfaat. Wawancara dilakukan secara tatap muka, dicatat dan ditranskrip, lalu digunakan untuk mendukung analisis kualitatif mengenai pelaksanaan dan dampak penggunaan Dana Desa. Isi wawancara mencakup perencanaan program, implementasi di lapangan, hambatan, serta pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dan bantuan sosial.

Dua sumber dokumentasi ini menjadi bahan pendukung utama dalam penyusunan data dan analisis, karena memberikan gambaran yang konkret dan aktual tentang bagaimana Dana Desa digunakan di Kalurahan Guwosari selama tahun 2024. Dengan mengandalkan dokumen resmi dan hasil wawancara yang aktual, penelitian ini berusaha memberikan pemahaman yang lebih utuh dan kontekstual sesuai kondisi lapangan.

**e. Teknik analisis data**

Teknik analisis data merupakan kelanjutan dari pengolahan data. Analisis data membahas terkait antara data dan latar belakang yang menyebabkan adanya persamaan atau perbedaan yang menghasilkan kesimpulan. Analisis data adalah proses transformasi, penafsiran, dan pengelompokan data yang telah dikumpulkan dalam rangka mencari pola atau temuan yang berguna dalam menjawab pertanyaan penelitian. Dalam analisis data kualitatif melibatkan tiga kegiatan utama: reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan melalui verifikasi. Reduksi Data: Menyeleksi, menyederhanakan, dan merangkum data yang relevan.

**a. Reduksi Data**

Data yang telah dikumpulkan direduksi menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk mempermudah analisis. Hal ini dapat dilakukan melalui pencatatan dan pengkodean data, klasifikasi dan kategorisasi data, serta membuat diagram atau grafik yang merepresentasikan data. Artinya reduksi data akan menghasilkan gambaran dan Langkah yang jelas dalam melaksanakan pengumpulan data selanjutnya. Tentunya hasil ini didapatkan melalui dari

lapangan seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah menjadi catatan tersistematis oleh peneliti.

b. Penyajian Data (display data)

Tahap ini menampilkan data yang telah direduksi dalam bentuk yang mudah dipahami dan relevan dengan pertanyaan penelitian. Display data dapat dilakukan dengan membuat tabel, matriks, diagram, dan grafik yang menggambarkan pola atau hubungan antara data. Data data yang telah dikumpulkan dan di reduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif. Selain itu juga bisa disajikan dalam bentuk matriks, bagan, dan grafik.

c. Verifikasi data

Verifikasi data melibatkan penarikan kesimpulan dari data yang telah direduksi dan ditampilkan. Kesimpulan yang diambil harus didukung oleh bukti yang jelas dan verifikasi dengan data. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat ringkasan data atau membandingkan data dengan temuan penelitian sebelumnya. Dalam tahap ini peneliti melakukan verifikasi data selama dilapangan baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subyek penelitian. Verifikasi data dilakukan dengan memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dengan pertanyaan penelitian, akurat, dan valid. Verifikasi data juga melibatkan pengecekan konsistensi antara temuan dengan data, serta mempertimbangkan faktor konteks yang dapat mempengaruhi interpretasi data. Dengan melakukan verifikasi data yang tepat, peneliti dapat memastikan keakuratan dan



keabsahan temuan penelitian, sehingga meningkatkan validitas dan kepercayaan pada hasil penelitian.

## **BAB II**

### **PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR DI KALURAHAN GUWOSARI**

Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan aspek utama dalam pembangunan masyarakat desa yang berkelanjutan. Kebutuhan dasar mencakup layanan kesehatan, pendidikan, pangan, perumahan, dan perlindungan sosial yang menjadi hak setiap warga. Di Kalurahan Guwosari, upaya pemenuhan kebutuhan dasar menjadi prioritas utama yang dituangkan melalui program-program pembangunan yang dibiayai oleh Dana Desa. Sebagaimana diatur dalam Permendesa Nomor 7 Tahun 2023, pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi fokus Kalurahan Guwosari meliputi dua hal utama, yaitu peningkatan layanan kesehatan dan penanggulangan kemiskinan. Keduanya disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi warga, di mana masih ditemukan ketimpangan akses layanan kesehatan serta tingginya beban pengeluaran bagi keluarga miskin.

Pemerintah Kalurahan Guwosari berupaya menjawab persoalan tersebut melalui alokasi Dana Desa untuk kegiatan-kegiatan seperti pembangunan dan renovasi fasilitas posyandu, pemberian makanan tambahan bagi balita dan lansia, penyuluhan kesehatan, serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Langkah-langkah ini dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi warga desa secara menyeluruh. Penempatan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai prioritas membuktikan bahwa Kalurahan Guwosari tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kesejahteraan manusianya secara berkelanjutan.

## **1. Kebutuhan Dasar Kalurahan guwosari**

Kebutuhan dasar masyarakat Kalurahan Guwosari meliputi beberapa aspek utama, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.

### **a. Pendidikan**

Pendidikan di Kalurahan Guwosari memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Saat ini, desa memiliki berbagai fasilitas pendidikan yang mencakup **10 Taman Kanak-Kanak (TK), 7 Sekolah Dasar (SD), dan 1 Sekolah Menengah Atas (SMA)** yang telah terakreditasi. Selain itu, terdapat juga **3 Sekolah Islam dan 3 Madrasah Ibtidaiyah**, yang memberikan pilihan pendidikan berbasis agama bagi masyarakat.

Pemerintah desa juga berupaya meningkatkan akses pendidikan tinggi melalui program "**Satu Dusun Satu Sarjana**", yang bertujuan memberikan kesempatan bagi masyarakat kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Dengan adanya berbagai fasilitas ini, masyarakat Kalurahan Guwosari diharapkan memiliki akses pendidikan yang lebih baik guna meningkatkan taraf hidup mereka.

### **b. Kesehatan**

Kesehatan masyarakat Kalurahan Guwosari menjadi perhatian utama pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan warga. Tersedia **2 Puskesmas/Balai Pengobatan** yang memberikan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Selain itu, terdapat tenaga medis seperti **bidan, mantri, dan dokter** yang siap melayani kebutuhan kesehatan warga. Meskipun sebagian besar rumah tangga sudah memiliki fasilitas sanitasi yang memadai, masih ada

yang menggunakan **MCK umum atau bahkan sungai** untuk keperluan sehari-hari, meskipun jumlahnya semakin menurun seiring dengan adanya program peningkatan infrastruktur sanitasi.

Pemerintah desa juga menjalankan program **LLT "Rasa Sayang"**, yang memberikan layanan kesehatan khusus bagi lansia agar mendapatkan perhatian lebih dalam aspek medis dan kesejahteraan.

#### c. **Ekonomi**

Sektor ekonomi Kalurahan Guwosari didominasi oleh **pertanian (91%)**, yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Selain sektor pertanian, pemerintah desa juga berupaya mengembangkan sektor **usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)** guna meningkatkan kesejahteraan warga. Berbagai inisiatif telah dilakukan untuk mendukung perekonomian, seperti penyediaan **kelompok simpan pinjam (3 unit)** yang bertujuan memberikan akses permodalan kepada pelaku usaha kecil.

Selain itu, inovasi berbasis digital juga diterapkan dengan adanya **Pasardesa.id**, sebuah platform pemasaran online yang membantu pemasaran produk lokal ke pasar yang lebih luas. Selain itu, program **BLT Dana Desa Non-Tunai** turut diberikan kepada warga yang membutuhkan sebagai bentuk dukungan ekonomi guna memenuhi kebutuhan dasar mereka.

#### d. **Infrastruktur**

Infrastruktur menjadi salah satu aspek penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kalurahan Guwosari. Penyediaan **air bersih** terus diupayakan agar seluruh warga mendapatkan akses sanitasi yang layak, meskipun masih

terdapat beberapa rumah tangga yang mengalami keterbatasan dalam pemanfaatannya. Selain itu, desa memiliki sistem pengelolaan sampah yang cukup baik dengan keberadaan **TPS 3R Go-Sari**, yang berfungsi sebagai fasilitas pengelolaan sampah berbasis zero waste guna menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Pemerintah desa juga terus melakukan **pembangunan dan pemeliharaan jalan desa** agar aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah semakin meningkat, sehingga dapat mendukung perekonomian dan mobilitas warga dalam beraktivitas sehari-hari.

Dengan berbagai inisiatif ini, Kalurahan Guwosari terus berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara optimal. Kebutuhan dasar masyarakat Kalurahan Guwosari meliputi beberapa aspek utama, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Dalam bidang pendidikan, pemerintah desa telah menjalankan program "Satu Dusun Satu Sarjana" yang bertujuan meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu, serta menyediakan akses pendidikan dasar dan menengah bagi seluruh warga.

Dalam bidang kesehatan, layanan Puskesmas dan Posyandu aktif beroperasi untuk mendukung kesehatan masyarakat, ditambah dengan program LLT "Rasa Sayang" yang memberikan layanan khusus bagi lansia. Pada sektor ekonomi, Dana Desa dimanfaatkan untuk mendukung UMKM dan sektor pertanian melalui program pemberdayaan masyarakat dan akses pasar digital seperti [Pasardesa.id](http://Pasardesa.id).

Selain itu, kebutuhan infrastruktur juga menjadi perhatian utama, dengan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, fasilitas air bersih, serta pengelolaan sampah melalui TPS 3R Go-Sari guna menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bersih. Dengan berbagai inisiatif ini, Kalurahan Guwosari terus berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara optimal.

## **2. Sejarah Kalurahan Guwosari**

Kalurahan Guwosari terbentuk pada bulan Oktober 1947 sebagai hasil penggabungan dua desa, yaitu Desa Selarong dan Desa Iroyudan, berdasarkan perintah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama Guwosari dipilih untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat tanpa menghilangkan ikon wilayahnya, yaitu Goa Selarong. Sejarah Selarong erat kaitannya dengan Pangeran Aryo Selarong, putra Prabu Hanyokrowati dari Kasultanan Mataram, yang berperan dalam Perang Jawa (1825-1830) bersama Pangeran Diponegoro. Wilayah Selarong pada masa itu sangat luas, mencakup Iroyudan dan sekitarnya. Sementara itu, Iroyudan diperkirakan berasal dari nama Kyai Ageng Wiroyudo, seorang panglima perang Sultan Hamengkubuwono I. Setelah Perang Jawa berakhir pada tahun 1830, wilayah ini mengalami penataan administrasi oleh Kasultanan Yogyakarta. Pada tahun 1914, Selarong dan Iroyudan masing-masing menjadi kademangan, sebelum akhirnya digabungkan kembali pada tahun 1947 menjadi Kalurahan Guwosari, dengan lurah pertama bernama Sukrowardi yang menjabat dari tahun 1946 hingga 1961.

## **3. Letak Geografis Kalurahan Guwosari**

Kalurahan Guwosari merupakan salah satu dari tiga kalurahan yang berada di wilayah administrasi Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah

Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, Kalurahan Guwosari terletak di bagian barat daya Kabupaten Bantul, dan memiliki topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga wilayah perbukitan yang termasuk dalam kawasan Pegunungan Seribu. Keberadaan bentang alam tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kondisi lingkungan, aktivitas sosial ekonomi, serta tata guna lahan masyarakat setempat. Wilayah Kalurahan Guwosari memiliki batas-batas administratif sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kalurahan Sendangsari, sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Bangunjiwo (Kapanewon Kasihan), sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Tamantirto (Kapanewon Kasihan), dan sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Wijirejo serta Gadingsari (Kapanewon Pandak). Letak yang strategis ini menjadikan Guwosari sebagai salah satu kawasan penyangga yang menghubungkan wilayah pedesaan dan kawasan yang lebih urban di Kabupaten Bantul. Kalurahan Guwosari terdiri atas sejumlah pedukuhan dengan karakteristik geografis yang cukup beragam, baik dari segi kemiringan lahan, jenis tanah, hingga penggunaan lahan. Secara umum, wilayah ini memiliki potensi yang cukup besar di bidang pertanian, peternakan, serta kerajinan rakyat, yang sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi alam dan letak geografisnya. Variasi topografi yang dimiliki juga memberikan tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur, namun sekaligus membuka peluang untuk pengembangan kawasan yang berbasis pada potensi lokal dan kearifan lingkungan.

#### **4. Kondisi geografis kalurahan guwosari**

Kalurahan Guwosari merupakan salah satu wilayah administrasi yang berada di Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, Kalurahan Guwosari memiliki kontur wilayah yang bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga perbukitan, terutama di bagian barat dan selatan wilayahnya. Kalurahan Guwosari memiliki luas wilayah kurang lebih 6,75 km<sup>2</sup> dan terdiri dari beberapa padukuhan yang tersebar di berbagai zona topografi. Wilayah ini dilalui oleh beberapa sungai kecil dan memiliki tanah yang subur, sehingga sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani dan pelaku usaha mikro.

a. Batas wilayah

Secara administrasi Kalurahan guwosari terletak di Kapanewon pajangan, Kabupaten Bantul mempunyai batasan wilayah dengan rincian sebagai berikut :

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Kalurahan Sendangsari (Kapanewon Pajangan)
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Kalurahan Tamantirto (Kapanewon Kasihan)
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kalurahan Bangunjiwo (Kapanewon Kasihan)
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Kalurahan Wijirejo dan Kalurahan Triwidadi (Kapanewon Pandak)

b. Kondisi wilayah



kalurahan Guwosari memiliki kondisi wilayah yang beragam, mencakup aspek topografi, penggunaan lahan, serta infrastruktur yang berkembang secara bertahap. Secara umum, wilayah ini dapat dikategorikan sebagai kawasan perdesaan semi-perkotaan (semi-urban), dengan karakteristik fisik sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Kondisi Wilayah Kalurahan Guwosari**

Aspek	Keterangan
Topografi	Bervariasi antara dataran rendah (timur) hingga perbukitan (barat dan selatan); ketinggian 75–200 meter di atas permukaan laut (mdpl).
Luas Wilayah	Sekitar 6,75 km <sup>2</sup>
Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lahan pertanian (sawah, kebun)</li> <li>- Permukiman</li> <li>- Perbukitan dan hutan rakyat</li> <li>- Fasilitas umum dan sosial</li> </ul>
Infrastruktur	Jalan desa, jalan penghubung antar-kalurahan, irigasi, puskesmas pembantu, balai kalurahan, sekolah, akses internet desa
Aksesibilitas	Dilewati jalan utama penghubung Pajangan–Kasih–Pandak;

	transportasi mudah dijangkau oleh kendaraan roda dua dan empat
Sumber Daya Alam	Batu kapur, tanah subur, air tanah cukup; mendukung pertanian, peternakan, kerajinan, dan UMKM lokal
Jumlah Padukuhan	18 padukuhan (Jagan, Kembang Putih, Jaten, Sembungan, Bibis, Benyo, Tangkil, Gunungpuyuh, dll.)

## 5. Kondisi Demografi Desa

Kondisi demografi mengacu pada gambaran statistik dan karakteristik populasi manusia di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. Kalurahan Guwosari merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Bantul yang terdiri dari 79 (tujuh puluh lima) Kalurahan. Kalurahan Guwosari merupakan salah satu desa di Kapanewon Pajangan yang memiliki luas wilayah 830,00 Ha dengan jumlah penduduk sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Total penduduk kalurahan guwosari**

Jumlah laki-laki	7.071 orang
Jumlah perempuan	7.025 orang
Jumlah total	14.096 orang
Jumlah kepala keluarga	4.813 KK

*Sumber data kependudukan kalurahan guwosari tahun 2024*

## 6. Kondisi Sosial dan Ekonomi

### A. Kondisi sosial

Kondisi sosial masyarakat Kalurahan Guwosari mencerminkan kehidupan yang berakar pada nilai-nilai budaya dan gotong royong. Masyarakat Kalurahan Guwosari memiliki akses terhadap pendidikan yang cukup baik, dengan adanya sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Selain itu, pemerintah desa juga memiliki program "Satu Dusun Satu Sarjana" yang bertujuan meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi bagi warga yang kurang mampu secara ekonomi. Dalam bidang kesehatan, layanan Puskesmas dan Posyandu tersedia bagi masyarakat, serta program LLT "Rasa Sayang" yang dikhususkan untuk memberikan layanan kesehatan bagi lansia.

Keberagaman budaya juga terlihat dalam kegiatan seni dan tradisi masyarakat, seperti kesenian lokal dan berbagai upacara adat yang masih dilestarikan oleh warga setempat. Mata pencaharian utama masyarakat Kalurahan Guwosari beragam, mencakup sektor pertanian, industri kreatif, dan perdagangan. Beberapa penduduk bekerja sebagai petani, sementara lainnya bergerak di bidang UMKM, termasuk kerajinan batok kelapa, pembuatan blangkon, serta produksi mebel dari kayu suar.

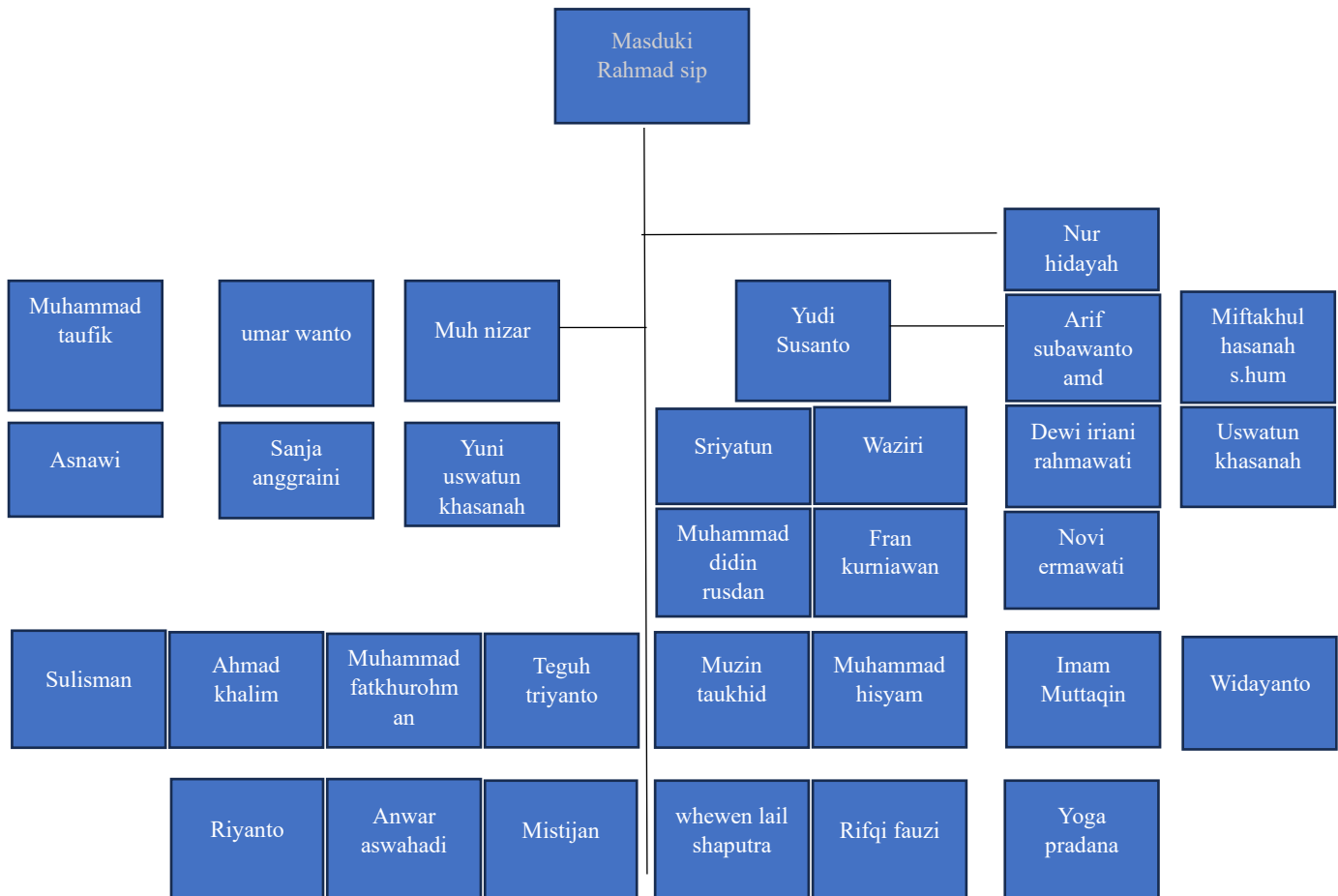
## **B. Kondisi Ekonomi**

Kondisi ekonomi Kalurahan Guwosari sangat dipengaruhi oleh sektor pertanian, industri kreatif, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Mata pencaharian utama masyarakat adalah bertani, dengan lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk tanaman pangan dan hortikultura. Selain pertanian, sektor UMKM berkembang cukup pesat dengan adanya industri kreatif seperti kerajinan batok kelapa yang telah menembus pasar ekspor, pembuatan blangkon, serta produksi mebel dari kayu suar.

Pemerintah desa juga mendukung perekonomian masyarakat melalui berbagai inovasi, seperti program BLT Dana Desa Non-Tunai yang menggunakan sistem transfer ATM untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas bantuan. Selain itu, platform Pasardesa.id dikembangkan sebagai marketplace bagi produk lokal agar lebih mudah dipasarkan secara luas. Pariwisata juga menjadi salah satu sektor yang berkontribusi terhadap perekonomian desa, dengan destinasi seperti Goa Selarong dan Desa Wisata Kampung Santan yang menarik banyak wisatawan. Dengan berbagai potensi ekonomi ini, Kalurahan Guwosari terus berupaya mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan warganya.

## 7. Struktur organisasi pemerintah kalurahan guwosari

Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Guwosari



Berdasarkan data diatas di atas dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi pemeintah desa sudah di jelaskan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pergub Nomor 25 Tahun 2019, Pemerintah Kalurahan Guwosari sudah menyusun struktur penyelesaian dengan cukup jelas sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.

**Tabel 2.3 Pemerintah Kalurahan Guwosari**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1.	Masduki Rahmad S.IP	Lurah	DIPLOMA IV/ STRATA I	L
2.	Nur Hidayad	Carik	DIPLOMA IV/ STRATA I	L
3.	Muhammad taufik	Jagabaya	SLTA / SEDERAJAT	L
4.	Arif Subawanto A.Md	Kaur Keuangan (Danarta)	AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA	L
5.	Miftakhul Khassanah S.H	Kaur Perencanaan (Pangripta)	DIPLOMA IV/ STRATA I	P
6.	Muhammad Taufik	Ka.Sie Pemerintahan (Jagabaya)	SLTA / SEDERAJAT	L
7.	Umarwanto	Ka.Sie Kesejahteraan (Ulu-Ulu)	SLTA / SEDERAJAT	L
8.	Hm. Nizar, BA	Ka.Sie Pelayanan (Kamituwo)	AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA	L
9.	Anwar Aswandi	Dukuh Kedung	SLTA / SEDERAJAT	L
10.	Ichwan	Dukuh Bungsing	SLTA/SEDERAJAT	L
11.	Muhammad Hisyam	Dukuh Iroyudan	SLTA / SEDERAJAT	L
12.	Yoga pradana	Dukuh Pringgading	DIPLOMA IV/ STRATA I	L
13.	Whewen lail shaputra	Dukuh Karangber	DIPLOMA IV/ STRATA I	L
14.	Riyanto	Dukuh Kalakijo	SLTA / SEDERAJAT	L
15.	Muhzin Taukhid	Dukuh Dukuh	SMU	L
16.	Teguh Triyanto	Dukuh Gandekan	SLTA / SEDERAJAT	L
17.	Muhammad Fatkhurohmi	Dukuh Kentolan Kidul	SLTA / SEDERAJAT	L
18.	Rifqi fauzi	Dukuh Santan	SLTA / SEDERAJAT	L

19.	Mistijan	Dukuh Watugedug	SLTA/SEDERAJAT	L
20.	Widayanto	Dukuh Kembanggede	SLTA / SEDERAJAT	L
21.	Imam Mutaqin	Dukuh Kadisono	SLTA / SEDERAJAT	L
22.	Sulisman	Dukuh Kembangputihan	SLTA / SEDERAJAT	L
23.	Ahmad Khalim	Dukuh Kentolan Lor	SLTA / SEDERAJAT	L
24.	Jumari	Staff	SLTA / SEDERAJAT	L
25.	Asnawi	Staff	SLTA / SEDERAJAT	L
26.	Sriyatun	Staff	SLTA / SEDERAJAT	P
27.	Muhhamad Didin rusdan	Staff honorer	SLTA / SEDERAJAT	L
28.	Sanja Anggraini	Staff honorer	SLTA / SEDERAJAT	P
29.	Fran Kurniawan	Staff honorer	SLTA / SEDERAJAT	L
30.	Dewi Iriani Rahmawati	Staff	DIPLOMA IV/ STRATA I	P
31.	Novi Ermawati	Staff honorer	DIPLOMA IV/ STRATA I	P
32.	Yuni Uswatun Khasanah	Staff honorer	DIPLOMA IV/ STRATA I	P
33.	Yudi Susanto	Tata laksana	DIPLOMA IV/ STRATA I	L
34.	Waziri	Staff honorer	AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA	L

Dari hasil tabel diatas disimpulkan bahwa Profil Pemerintah Kalurahan Guwosari terbanyak yang dipimpin oleh laki-laki sedangkan perempuan hanya satu yaitu dari Kaur Perencanaan, dan yang berpendidikan tingkat SMU lebih banyak ketimbang yang berpendidikan lain-lain.

## 8. APBkal Guwosari dan Dana Desa

### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

#### PEMERINTAH KALURAHAN GUWOSARI

#### TAHUN ANGGARAN 2024

**Tabel 2.4**

Kode Rekening		Uraian	Anggaran Rp	Sumber Dana
1	2			
	4.	Pendapatan		
	4.1	Pendapatan asli desa	409,490,500.00	
	4.2	Pendapatan transfer	7,063,054,719.00	
	4.3	Pendapatan lain lain	23,166,902.00	
		Jumlah Pendapatan	7,495,712,121.00	
	5.	Belanja		
<b>1.</b>		<b>Belanja bidang pemdes</b>	<b>2,988,551,233.00</b>	
1.1.		Penyelenggaraan belanja siltap tunjangan dan operasional pemdes	2,277,147,168.00	
1.1.01		Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	61,895,520.00	ADD
1.1.02		Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala desa dan Perangkat desa	792,023,424.00	ADD
1.1.03.		Penyediaan jaminan social bagi Kepala desa dan Perangkat desa	19,760,000.00	ADD
1.1.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	255,180,731.00	ADD, DII
1.1.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	114,600,000.00	PBH
1.1.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	36,770,000.00	ADD
1.1.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	107,200,000.00	PBH
1.1.08.		Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	57,000,000.00	DDS,
1.1.90.		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	13,524,000.00	PAD,
1.1.91.		Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal	9,550,000.00	PAD,



1.1.92.		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	108,123,565.00	PAD, PBH,
1.1.93.		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	158,282,052.00	PAD, PBH,
1.1.94.		Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh	180,000,000.00	PAD,
1.1.96.		Tunjangan Masa Kerja	54,000,000.00	PAD,
1.1.97.		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	116,802,036.00	ADD,
1.1.98.		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer	192,435,840.00	ADD,
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	124,301,900.00	
1.2.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	21,500,000.00	ADD
1.2.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	17,500,000.00	DDS,
1.2.03.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	85,301,900.00	DDS,
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	35,550,000.00	
1.3.01.		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1,080,000.00	DLL,
1.3.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3,850,000.00	DDS,
1.3.03.		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1,200,000.00	DDS,
1.3.05.		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	13,940,000.00	PBK,
1.3.93.		Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker/EHDW	15,480,000.00	DDS,
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	508,052,019.00	
1.4.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14,250,000.00	DDS
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler	29,700,000.00	DDS
1.4.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	14,635,000.00	DDS,
1.4.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDDes, APBDDes Perubahan, LPJ dll)	12,081,782.00	PBH,
1.4.05.		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	4,175,000.00	DDS

1.4.06.		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	34,800,000.00	DDS
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	9,575,000.00	DLL,
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	90,600,000.00	DDS,
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	224,360,237.00	PAD, PBK,
1.4.90		Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer	27,925,000.00	ADD, DLL,
1.4.95.		Fasilitas Kegiatan Bamuskal	45,950,000.00	DDS,
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	43,500,146.00	
1.5.03.		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	20,000,000.00	DDS,
1.5.06.		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	20,475,146.00	DDS, DLL, PAD,
1.5.91.		Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	3,025,000.00	DLL, PBH,
<b>2</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>3,984,480,000.00</b>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	358,421,000.00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	113,885,000.00	BMP, DDS,
2.1.02.		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	161,938,000.00	BMP,
2.1.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	24,598,000.00	BMP,
2.1.06.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/M	50,000,000.00	DDS,
2.1.10.		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	8,000,000.00	DDS
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	801,337,000.00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	69,300,000.00	DDS
2.2.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	308,050,000.00	DDS,
2.2.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	102,222,000.00	DDS, BMP
2.2.06		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	725,000.00	DDS

		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	15,000,000.00	DDS
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	252,440,000.00	BMP
2.2.92.		Pembinaan Kampung KB	5,550,000.00	DDS, DLL,
2.2.94.		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	21,950,000.00	DDS,
2.2.96.		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	26,100,000.00	DDS,
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,280,000,000.00	
2.3.06.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	10,000,000.00	DDS,
2.3.11.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	835,000,000.00	PBK, PBP,
2.3.14.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	335,000,000.00	PBK, PBP,
2.3.18.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	100,000,000.00	DDS,
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	419,690,000.00	
2.4.01.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	389,690,000.00	DDS, PBK, PBP,
2.4.90.		Pengelolaan Pamsimas / Air Minum Kalurahan	30,000,000.00	PBK,
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	948,137,000.00	
2.5.91.		Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	49,161,000.00	BMP,
2.5.93.		Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah	898,976,000.00	BMP, PBK, PBP,
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	167,495,000.00	
2.6.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	7,495,000.00	DDS,
2.6.91		Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	160,000,000.00	PBK
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	9,400,000.00	
2.8.03.		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	9,400,000.00	DDS, DLL
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>362,325,000.00</b>	

3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	69,665,000.00	
3.1.01.		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	17,280,000.00	DDS,
3.1.02.		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	32,725,000.00	DDS, PBK,
3.1.03.		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	5,000,000.00	PBK,
3.1.92.		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	14,660,000.00	DDS,
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	176,815,000.00	
3.2.01.		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	23,450,000.00	DDS,
3.1.02.		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	32,725,000.00	DDS, PBK,
3.1.03.		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	5,000,000.00	PBK,
3.1.92.		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	14,660,000.00	DDS,
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	176,815,000.00	
3.2.01.		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	23,450,000.00	DDS,
3.2.02.		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	10,000,000.00	DDS
3.2.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, budaya	71,275,000.00	DDS
3.2.90.		Pembinaan Bidang Keagamaan	60,340,000.00	ADD, DDS,
3.2.92.		Fasilitasi Pelaksanakan MTQ/MHQ/PORSADIN	1,750,000.00	DDS
3.2.93.		Pengembangan Desa Budaya	10,000,000.00	DDS
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	63,920,000.00	
3.3.05.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	5,000,000.00	DDS
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	48,920,000.00	DDS

3.3.1.		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	10,000,000.00	PBK,
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	51,925,000.00	
3.4.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12,425,000.00	DDS
3.4.03		Pembinaan PKK	39,500,000.00	DDS,
<b>4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>271,129,000.00</b>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	29,500,000.00	
4.1.05.		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	29,500,000.00	DDS,
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	169,484,000.00	
4.2.01.		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	16,500,000.00	DDS
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	80,000,000.00	DDS,
4.2.90		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	29,109,000.00	DDS,
4.2.91		Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan/ Pasca Panen	3,675,000.00	DDS,
4.2.92.		Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan	19,500,000.00	DDS
4.2.94		Pembentukan/Pelatihan Kader Keamanan Pangan Tingkat Kalurahan	20,700,000.00	DDS
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	22,665,000.00	
4.4.03.		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	7,565,000.00	PBK
4.4.91.		Pembinaan/Penyuluhan/Pendampingan Korban Kekerasan/KDRT/Bina Keluarga	4,000,000.00	DDS
4.4.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	11,100,000.00	PBK
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	23,730,000.00	
4.5.90.		Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha	19,130,000.00	DDS,
4.5.99.		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	4,600,000.00	PBK
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	25,750,000.00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	25,750,000.00	DDS
<b>5</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	<b>128,000,000.00</b>	

5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10,000,000.00	
5.1.00.		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10,000,000.00	DDS
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	10,000,000.00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10,000,000.00	DDS,
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108,000,000.00	
5.3.01.		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	108,000,000.00	DDS
		JUMLAH BELANJA	7,734,485,233.00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(238,773,112.00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1	Penerimaan Pembiayaan	338,473,112.00	
	6.2	Pengeluaran Pembiayaan	99,700,000.00	
		PEMBIAYAAN NETTO	238,773,112.00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

Sumber *Apbkal guwosari 2024*

Dalam hal ini saya akan menganalisis total anggaran pendapatan dan belanja desa kalurahan guwosari, untuk menghitung total anggaran dan belanja desa kalurahan guwosari kita harus mengetahui terlebih dahulu total anggaran pendapatan seperti yang telah di cantumkan dalam tabel tersebut maka total pendapatan asli desa, pendapatan tranfer dan pendapatan lain lain yang di dapatkan desa senilai 7,495,712,121,00 akan kita bagikan dengan total belanja desa di setiap bidangnya dan kita kalikan 100 untuk mendapatkan total dari masing masing bidang tersebut. Maka saya akan menghitung totalnya sebagai berikut :

- a. Bidang penyelenggaran pemerintah desa : 38,9 %
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa : 53,1%
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan : 53,1%
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat : 3.6 %
- e. Bidang penanggulangan bencana : 1,7 %

Maka dari itu dapat di simpulkan bahwa anggaran dan belanja desa pemerintahan kalurahan guwosari 2024 benar benar di pergunakan dalam bidang masing masing seperti pada Bidang penyelenggaran pemerintahan desa mencapai 38,9 % Menunjukkan bahwa hampir 40% anggaran difokuskan untuk operasional pemerintahan desa,Bidang pelaksanaan pembangunan desa juga mencapai 53,1% bidang ini yang merupakan bagian terbesar yang menunjukkan fokus utama desa pada pembangunan fisik sedangkan Bidang pembinaan kemasyarakatan mencapai 4,8% bidang ini mendapatkan alokasi yang mencerminkan upaya desa dalam pengembangan sosial dan budaya masyarakat,Bidang pemberdayaan masyarakat juga mencapai 3,6 % yang menunjukkan perhatian terhadap peningkatan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat dan Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa mencapai 1,7 % yang di gunakan untuk mengatasi situasi darurat yang datang secara tiba tiba tanpa di ketahui.

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH DESA GUWOSARI**  
**KECAMATAN PAJANGAN**

**Tabel 2,5**

	<b>URAIAN</b>	<b>PENERIMAAN (Rupiah)</b>	<b>PENGELUA RAN (Rupiah)</b>	<b>Sisa (Rupiah)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Pendapatan			
	Dana desa	1.927.249.000,00		
	Penyaluran ke-1	616.242.000,00		
	Penyaluran ke-2	540.107.400,00		
	Penyaluran ke-3	360.071.600,00		
	Penyaluran ke-4	410.828.000,00		
2	BELANJA			
	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>482.713.800, 00</b>	
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa		46.261.250,0 0	
	Pembangunan/Rehabilitas i/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)		85.301.900,0 0	
	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif		4.000.000,00	
	Pengelolaan Aplikasi E- Human Developmant Worker		15.480.000,0 0	
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)		12.950.000,0 0	
	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)		33.882.500,0 0	



	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)		11.709.900,00	
	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)		23.634.000,00	
	Pengembangan Sistem Informasi Desa		104.550.000,00	
	Pengadaan / Pengembangan / Pengelolaan Aplikasi / Sistem teknologi Informasi Berbasis Digital		100.000.000,00	
	Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal		40.349.250,00	
	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		4.595.000,00	
	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		<b>668.218.100,00</b>	
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)		110.760.000,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan		50.000.000,00	
	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		8.000.000,00	
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)		68.850.000,00	
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)		286.804.100,00	
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)		13.220.000,00	
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		725.000,00	
	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		6.000.000,00	

	Pembinaan Kampung KB		5.425.000,00	
	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting		21.950.000,00	
	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)		26.100.000,00	
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		4.984.000,00	
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN		50.000.000,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa		10.000.000,00	
	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		5.400.000,00	
	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>		<b>312.025.500,00</b>	
	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa		20.120.000,00	
	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes		2.725.000,00	
	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)		23.450.000,00	
	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		16.970.000,00	
	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)		8.700.000,00	
	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)		67.560.000,00	
	Pembinaan Bidang Keagamaan		51.655.000,00	
	Pengembangan Desa Budaya		9.375.000,00	

	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota -		6.000.000,00	
	Pembangunan/Rehabilitas i/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa		5.000.000,00	
	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa		48.895.500,0 0	
	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD		12.425.000,0 0	
	Pembinaan PKK		39.150.000,0 0	
	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		<b>358.448.000, 00</b>	
	Penyertaan Modal BUMDes		99.700.000,0 0	
	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)		29.500.000,0 0	
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pen ggilingan)		16.500.000,0 0	
	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		79.640.000,0 0	
	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan		43.833.750,0 0	
	Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan/ Pasca Panen		3.669.000,00	
	Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan		19.500.000,0 0	
	Pembentukan/Pelatihan Kader Keamanan Pangan Tingkat Kalurahan		18.831.250,0 0	
	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi		4.580.000,00	

	Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha		17.927.000,00	
	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa		24.767.000,00	
	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>		<b>116.887.500,00</b>	
	Kegiatan Penanggulangan Bencana		8.887.500,00	
	Penanganan Keadaan Mendesak		108.000.000,00	
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
	<b>SILPA TAHUN SEBELUMNYA</b>	<b>94.121.900,00</b>		
	Silpa Dana Desa	94.121.900,00		
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.021.370.900,00</b>	<b>1.938.292.900,00</b>	<b>83.078.000,00</b>

*Sumber Kalurahan guwosari*

Dalam hal ini saya akan menganalisis realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran 2024 di kalurahan guwosari seperti yang sudah di cantumkan dalam tabel di atas. Maka dari itu Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Guwosari tahun 2024, penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat difokuskan pada dua sektor utama, yaitu kesehatan dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan Permendesa Nomor 7 Tahun 2023 yang menekankan prioritas Dana Desa pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti peningkatan akses layanan kesehatan dan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin untuk kebutuhan dasar di Kalurahan Guwosari tahun 2024 sebagai berikut:

a) Bidang kesehatan

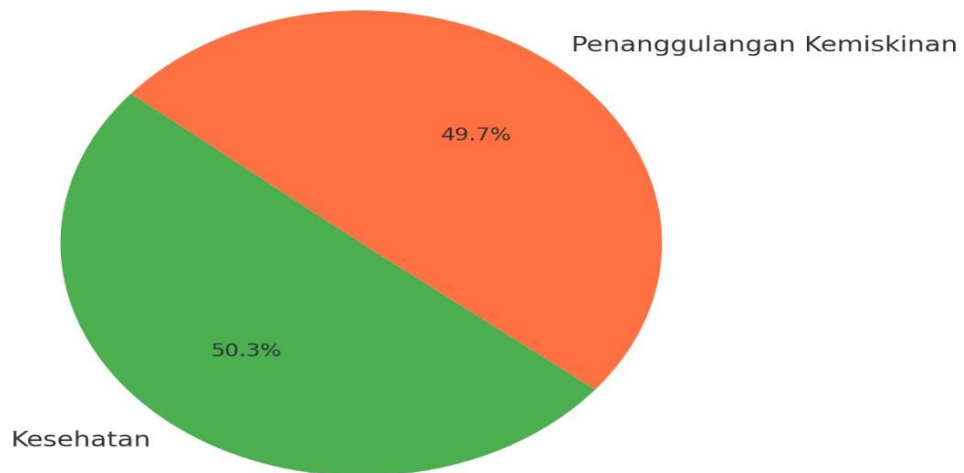
Pada Bidang kesehatan, total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp801.337.000,00, yang mencakup berbagai program seperti penyelenggaraan posyandu, penyediaan makanan tambahan balita dan lansia, pelatihan kader kesehatan, hingga pembangunan sarana kesehatan desa.

b) Bidang penanggulangan kemiskinan

Sementara itu, untuk penanggulangan kemiskinan, Dana Desa digunakan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dengan alokasi sebesar Rp792.000.000,00, yang ditujukan untuk membantu masyarakat kurang mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa 2024 di kalurahan guwosari sangat di gunakan sebagai mana yang sudah di cantumkan dalam tabel di atas dan di analis untuk mencapai total pada masing masing bidang

Dengan demikian, total anggaran Dana Desa tahun 2024 yang digunakan untuk dua sektor prioritas tersebut mencapai Rp1.593.337.000,00. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah Kalurahan Guwosari dalam memprioritaskan kesejahteraan warga melalui peningkatan kualitas hidup dan penurunan tingkat kemiskinan.

**Distribusi Penggunaan Dana Desa 2024  
(Kesehatan & Kemiskinan) - Kalurahan Guwosari**



Berikut adalah grafik yang menggambarkan distribusi penggunaan Dana Desa tahun 2024 Kalurahan Guwosari untuk bidang Kesehatan dan Penanggulangan Kemiskinan.

Keterangan:

- Warna hijau menunjukkan alokasi untuk Kesehatan (Rp801.337.000,00).
- Warna oranye menunjukkan alokasi untuk Penanggulangan Kemiskinan (Rp792.000.000,00).

#### **9. Potensi dan Inovasi Desa**

Kalurahan Guwosari memiliki berbagai potensi wisata yang menarik, salah satunya adalah Goa Selarong yang merupakan destinasi wisata sejarah dan religi. Selain itu, terdapat Desa Wisata Gunung Mijil (Dewi Gumi) yang

menawarkan wisata edukasi dan budaya, serta Desa Wisata Kampung Santan yang terkenal dengan kuliner Ingkung Ayam dan pasar tradisional "Sobo Papringan". Kalurahan ini juga memiliki Kedung Bike Park, yang menawarkan pengalaman wisata olahraga bersepeda. Selain potensi wisata, Kalurahan Guwosari juga dikenal dengan produk-produk unggulan seperti kerajinan batok kelapa yang telah diekspor ke berbagai negara, serta kerajinan blangkon yang banyak diminati oleh pasar domestik maupun internasional.

Dalam upaya mendukung perekonomian masyarakat, pemerintah desa juga menginisiasi berbagai inovasi, seperti program BLT Dana Desa Non-Tunai yang menggunakan transfer ATM untuk meningkatkan transparansi, serta pengembangan Pasardesa.id sebagai platform e-commerce bagi produk lokal. Selain itu, Kalurahan Guwosari juga memiliki TPS 3R Go-Sari yang menjadi pionir dalam pengelolaan sampah berbasis zero waste, serta Festival Guwosari Inklusi yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok rentan di masyarakat

### **BAB III**

#### **PENGUNAAN DANA DESA 2024 UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR DI KALURAHAN GUWOSARI**

Pada bab ini, peneliti akan mengulas secara mendalam mengenai bagaimana penggunaan Dana Desa tahun 2024 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembahasan difokuskan pada hasil penelitian yang telah diperoleh di lapangan, dengan menyajikan data secara rinci dan sistematis berdasarkan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Seluruh informasi yang diperoleh berasal dari narasumber yang telah dipilih sesuai dengan ruang lingkup dan batasan penelitian ini. Peneliti kemudian menganalisis data tersebut guna memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana proses penggunaan Dana Desa dilakukan dan bagaimana dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Penggunaan Dana Desa menjadi bagian penting dalam melihat kapasitas pemerintah Kalurahan dalam menjalankan fungsi pelayanan dasar kepada warganya. Jika dikelola dengan baik, Dana Desa dapat mendukung terwujudnya akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan pemberdayaan ekonomi.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan penggunaan dana juga sangat krusial. Keterlibatan warga menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah Kalurahan, serta mencerminkan tumbuhnya budaya demokrasi di tingkat lokal. Untuk mengetahui



lebih lanjut mengenai hasil penelitian ini, peneliti telah menyusun pembahasan secara lebih terfokus melalui dua sub bab berikut ini.

#### **A. Penggunaan Dana Desa Untuk Kebutuhan Dasar Masyarakat Pada Bidang Kesehatan**

Kesehatan menjadi salah satu hal penting yang turut diperhatikan dalam penggunaan Dana Desa di Kalurahan Guwosari pada tahun 2024. Pemerintah kalurahan menyadari bahwa upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat adalah bagian dari pembangunan manusia yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, sebagian dana dialokasikan untuk mendukung kegiatan-kegiatan di bidang kesehatan.

Berbagai program dilaksanakan untuk mendorong perilaku hidup sehat di masyarakat. Beberapa di antaranya adalah kegiatan posyandu, penyuluhan kesehatan, dan pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil. Program-program tersebut bertujuan untuk mencegah penyakit sejak dini dan memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan layanan dasar.

Pelayanan kesehatan berbasis komunitas menjadi pilihan utama karena dinilai paling dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Selain itu, kegiatan kesehatan ini juga melibatkan kader-kader lokal seperti kader posyandu, yang selama ini berperan aktif dalam mendampingi warga. Pelibatan warga secara langsung juga membuat program terasa lebih dekat dan sesuai dengan kebutuhan.

Pemerintah kalurahan juga menjalin kerja sama dengan pihak puskesmas dan tenaga kesehatan setempat agar kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai standar. Sinergi ini penting agar program kesehatan di tingkat desa tetap terarah dan mendapat dukungan teknis yang memadai.

Penggunaan Dana Desa dalam bidang kesehatan menunjukkan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat tidak hanya berupa pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh aspek kualitas hidup. Upaya ini menjadi salah satu langkah penting dalam membangun desa yang sehat dan berdaya.

Secara keseluruhan, penggunaan Dana Desa untuk bidang kesehatan di Kalurahan Guwosari sudah mencerminkan upaya pemerintah kalurahan dalam memenuhi hak dasar masyarakat. Meski masih ada kendala, langkah ini sudah berada di jalur yang tepat dan perlu terus diperkuat melalui partisipasi warga serta dukungan lintas sektor. Dengan begitu, Dana Desa benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan bersama.

Sebagai pelengkap dari penjelasan sebelumnya, wawancara dengan aparat desa menunjukkan bahwa perhatian terhadap bidang kesehatan benar-benar menjadi salah satu prioritas dalam penggunaan Dana Desa. Carik Kalurahan Guwosari, Nur Hidayah, menyampaikan bahwa kegiatan kesehatan yang dijalankan tidak hanya terbatas pada balita dan ibu hamil saja, tapi juga menyentuh kelompok lansia yang sering kali luput dari perhatian.

Menurut Nur hayati selaku ketua kader posyandu mengatakan “

*“dari kalurahan juga menganggarkan makanan tambahan untuk lansia, termasuk juga untuk balita yang masuk kategori stunting. Selain itu juga ada kegiatan penyemprotan nyamuk, apalagi kalau pas musim hujan dan banyak keluhan soal DBD akan tetapi hal ini kadang tidak di dukung oleh pihak keluarga yang membutuhkan contohnya dalam hal pemberian makan tambahan untuk balita banyak orang tua yang berkategori miskin atau kurang mampu malah lebih memelih membiarkan anak anaknya tumbuh dengan cara mereka sendiri maka sangat di sayangkan ,lain halnya dengan lansia mereka malah berbondong untuk mengikuti hal tersebut katanya sembari ketemu reuni*

*dan juga sangat sehat buat Kesehatan di masa tua. (Wawancara 30 mei 2025)*

Kegiatan seperti ini, menurut Pak Nur Hidayah, penting dilakukan karena menjaga kesehatan masyarakat bukan hanya soal pengobatan, tapi juga pencegahan sejak awal. Ia juga menekankan bahwa koordinasi dengan kader kesehatan di padukuhan sangat membantu karena mereka lebih memahami kondisi di wilayah masing-masing.

Lebih jauh, Pak Nur Hidayah menjelaskan bahwa

*“pemerintah kalurahan tetap membuka ruang untuk evaluasi, termasuk mendengar masukan dari warga soal kegiatan kesehatan yang dirasakan manfaatnya. Dengan begitu, anggaran yang dikeluarkan bisa benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.”*

Sementara itu, dari pihak BPD, Arwan, salah satu anggotanya, juga menyampaikan bahwa kegiatan posyandu rutin masih menjadi ujung tombak layanan kesehatan desa. Ia mengatakan:

*“Posyandu itu terus jalan, ada yang untuk remaja, balita, sama lansia. Biasanya juga disediakan makanan tambahan, apalagi buat anak-anak. Itu penting buat pencegahan stunting dan juga supaya warga tetap semangat ikut kegiatan.” (Wawancara, 25 April 2025)”*

Pak Arwan juga menambahkan bahwa kegiatan posyandu ini tidak hanya memberi manfaat langsung, tapi juga menjadi ruang edukasi yang sederhana dan dekat dengan warga. BPD sendiri, menurutnya, ikut memantau pelaksanaannya agar tetap berjalan baik dan bisa ditingkatkan dari tahun ke tahun.

Selain kegiatan yang bersifat rutin seperti posyandu dan penyuluhan, pemerintah kalurahan juga memanfaatkan Dana Desa untuk memperbaiki fasilitas kesehatan warga yang dinilai sudah tidak layak. Hal ini dijelaskan oleh Muhammad

Fatkhurohmi selaku dukuh yang menyebutkan bahwa ada program renovasi jamban bagi warga yang kondisi sanitasi rumahnya tergolong buruk.

*“Ada juga kegiatan jambanisasi. Itu kami lakukan setelah survei ke lapangan, kita lihat mana rumah yang jambannya sudah enggak layak pakai. Nah, itu kami bantu renovasi pakai Dana Desa, supaya warga punya tempat buang air yang sehat dan tidak mencemari lingkungan.”*  
(Wawancara, 30 mei 2025)

Menurut Muhammad Fatkhurohmi selaku dukuh, kegiatan semacam ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Pemerintah desa melakukan pendataan terlebih dahulu, bekerja sama dengan ketua RT dan kader, untuk memastikan penerima bantuan benar-benar membutuhkan. Renovasi jamban ini biasanya menyasar rumah-rumah yang belum memiliki fasilitas MCK yang memadai, atau yang masih menggunakan model jamban terbuka di sekitar kebun atau saluran air.

Kemudian, terkait apakah ada lembaga pendukung yang turut serta menjalankan program bidang kesehatan dengan dukungan Dana Desa, Pak Arwan, anggota BPD, menjawab bahwa memang ada. Salah satunya adalah Puskesmas (Pusat Kesejahteraan Sosial) yang turut berperan sebagai penghubung informasi dan layanan sosial di desa.

*“Ada juga Puskesmas di kalurahan. Itu yang biasa jadi tempat rujukan atau penghubung kalau ada warga yang butuh layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Jadi masyarakat bisa lebih mudah mengakses informasi dan bantuan.”* (wawancara 25 April 2025)

Lalu, menyinggung tentang kegiatan edukasi atau pencegahan kesehatan yang didanai dari Dana Desa, kembali menjelaskan adanya kegiatan rembuk stunting dan penyuluhan rutin.

*“Ya, ada yang namanya rembuk stunting. Itu setiap tahun kita adakan bareng-bareng kader, puskesmas, dan tokoh masyarakat. Kita bahas data stunting yang masuk terus kita rumuskan solusinya. Selain itu juga ada kegiatan penyuluhan rutin soal gizi, kebersihan, sama pola asuh anak.” (wawancara 23 April 2025).*

Dari penjelasan yang disampaikan oleh pihak BPD maupun pemerintah kalurahan, dapat dilihat bahwa penggunaan Dana Desa dalam bidang kesehatan tidak hanya terfokus pada kegiatan fisik atau pelayanan langsung, tapi juga menyentuh aspek kelembagaan dan edukasi. Keberadaan Puskesmas menjadi contoh konkret bagaimana desa membangun sistem layanan yang bisa menjangkau kebutuhan warga secara menyeluruh, terutama kelompok rentan.

Selain itu, kegiatan seperti rembuk stunting dan penyuluhan rutin menunjukkan bahwa pemerintah kalurahan tidak hanya berpikir jangka pendek, melainkan juga berupaya mendorong perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat dalam menjaga kesehatan. Kolaborasi antara kader, puskesmas, dan warga menjadi kunci dalam menjalankan kegiatan ini secara berkelanjutan. Dengan begitu, program kesehatan yang dibiayai dari Dana Desa bisa memberikan dampak yang lebih luas dan bertahan dalam jangka panjang.

Oleh karena itu dapat di simpulkan dari beberapa hasil wawancara yang saya selaku peneliti lakukan dengan tenaga kesehatan maupun kader posyandu dan juga tenaga pegawai lainnya bahwa dana desa 2024 di kalurahan guwosari benar benar menunjukkan bahwa bidang kesehatan menjadi salah satu prioritas penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah kalurahan mengalokasikan dana untuk berbagai program yang menasar kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan lansia. Program-program seperti posyandu, pemberian

makanan tambahan, penyuluhan gizi, hingga kegiatan penyemprotan nyamuk serta jambanisasi menjadi wujud nyata perhatian desa terhadap kesehatan masyarakat.

Partisipasi aktif kader posyandu dan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Puskesmas dan Puskesmas, memperkuat pelaksanaan program kesehatan berbasis komunitas. Tak hanya layanan langsung, pemerintah kalurahan juga mendorong edukasi dan perubahan perilaku masyarakat melalui kegiatan seperti rembuk stunting dan penyuluhan rutin. Pelibatan masyarakat dalam evaluasi program pun menjadi strategi penting agar anggaran yang digunakan tepat sasaran.

Secara keseluruhan, pendekatan komprehensif dan kolaboratif yang dilakukan Kalurahan Guwosari dalam penggunaan Dana Desa untuk bidang kesehatan menunjukkan keseriusan pemerintah desa dalam memenuhi hak dasar masyarakat. Langkah ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hidup warga, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial desa melalui layanan kesehatan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

#### **B. Penggunaan Dana Desa Untuk Kebutuhan Dasar Masyarakat Pada Bidang Penanggulangan Masyarakat Miskin**

Salah satu bentuk penggunaan Dana Desa tahun 2024 di Kalurahan Guwosari adalah untuk memberikan bantuan sosial kepada warga yang masuk dalam kategori miskin. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama bagi mereka yang secara ekonomi belum stabil.

Bantuan sosial menjadi salah satu upaya pemerintah desa dalam menciptakan rasa keadilan dan kepedulian sosial.

Bantuan sosial yang diberikan bisa berbentuk barang maupun dukungan finansial, tergantung pada kebutuhan masyarakat dan kebijakan desa. Program ini dirancang agar bisa menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan, terutama yang terdampak kondisi ekonomi tertentu. Pemerintah kalurahan menyusun program ini dengan mempertimbangkan situasi sosial di tiap padukuhan.

Pemberian bantuan ini juga merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah desa terhadap kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap. Dengan bantuan ini, diharapkan kebutuhan pokok mereka bisa terpenuhi, meskipun sifatnya tidak permanen.

Program bantuan sosial menjadi bagian dari prioritas desa karena menyangkut langsung dengan kesejahteraan warga. Dana Desa dimanfaatkan sebagai instrumen untuk meringankan beban warga dan mendukung mereka menjalani kehidupan yang lebih layak. Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan desa juga mencakup aspek sosial, bukan hanya pembangunan fisik.

Secara keseluruhan, program bantuan sosial dari Dana Desa merupakan bentuk kepedulian pemerintah desa terhadap kondisi warganya. Bagaimana program ini dijalankan dan diterima oleh masyarakat akan terlihat dari hasil dan dampak yang ditimbulkannya di lapangan.

Dalam wawancara mengenai bentuk bantuan sosial yang didanai dari Dana Desa, Carik Kalurahan Guwosari, Pak Nur Hidayah, menjelaskan bahwa salah satu bentuk bantuannya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diperuntukkan

bagi masyarakat miskin atau terdampak secara ekonomi. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang tunai yang dicairkan secara berkala setiap beberapa bulan.

*“Dulu itu ada BLT dari Dana Desa. Warga yang betul-betul masuk kategori miskin dan belum pernah dapat bantuan lain, itu yang diprioritaskan. Biasanya pencairannya setiap tiga bulan sekali, jadi dalam setahun bisa sampai empat kali terima.”(Wawancara, 2 Mei 2025)”*

Beliau juga menambahkan bahwa mekanisme pemberian bantuan tetap mengikuti hasil musyawarah dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat, namun pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan warga di tingkat lokal.

Dari penjelasan Informan, dapat dipahami bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan melalui Dana Desa merupakan salah satu upaya pemerintah kalurahan untuk membantu warga yang terdampak ekonomi. Program ini secara khusus menyasar masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan lain dari pemerintah pusat, seperti PKH atau BPNT. Dengan pencairan yang dilakukan setiap tiga bulan sekali, warga dapat menerima bantuan tersebut hingga empat kali dalam setahun, yang bertujuan untuk meringankan beban hidup mereka.

Pak Nur Hidayah, Carik Kalurahan Guwosari, menyatakan bahwa pemberian BLT ini dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan perangkat padukuhan. Sebelum memutuskan siapa saja yang berhak menerima bantuan, terlebih dahulu dilakukan pendataan berbasis kebutuhan warga, yang kemudian disesuaikan dengan ketentuan dari pemerintah pusat. Dengan cara ini, diharapkan bantuan dapat diberikan secara adil dan tepat sasaran, mengingat banyaknya warga yang memerlukan dukungan dari pemerintah.



Proses pendistribusian BLT yang konsisten ini juga memudahkan warga untuk mengakses bantuan. Seperti yang dijelaskan oleh Carik, bantuan ini tidak hanya diberikan berdasarkan kuota yang ditetapkan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan dan musyawarah. Dengan pendekatan ini, masyarakat merasa lebih diberdayakan, dan bantuan yang diterima dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan mendasar, terutama di masa-masa sulit.

*“Menurut dukuh ahmad khalim dalam membantu masyarakat miskin juga terdapat beberapa program langsung yang juga di danai dari dana desa seperti program ternak kambing domba dan juga sapi yang sekarang sedang berjalan di tiap padukuhan dan juga ada program KwT untuk Wanita tani dalam pemberian bibit sayur seperti cabe ,tomat,jeruk nipis dan lainnya dan itu sangat membantu masyarakat miskin dalam membantu ketahanan pangan dari individu tersebut yang mau bekerja”.*(wawancara 30 mei 2025)

Sementara itu, dari keterangan salah satu masyarakat penerima manfaat, diperoleh informasi bahwa proses untuk mendapatkan bantuan sosial seperti BLT dimulai dengan adanya undangan dari pihak padukuhan. Warga yang dianggap masuk dalam kategori sasaran akan dihubungi terlebih dahulu, lalu mengikuti proses verifikasi data.

*“Saya waktu itu dapat undangan dari Dukuh. Terus diminta bawa fotokopi KTP sama KK ke balai desa. Katanya mau dicek datanya, apakah benar belum pernah dapat bantuan lain.”* (wawancara, 2 mei 2025).

Saat ditanya mengenai seberapa besar manfaat bantuan sosial yang diterima, beberapa warga menyatakan bahwa bantuan tersebut sangat membantu dalam mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Bantuan seperti BLT, meskipun tidak dalam jumlah besar, dianggap cukup berarti bagi rumah tangga yang memiliki penghasilan terbatas.

*“Sangat membantu, Mbak. Waktu itu BLT saya pakai untuk bayar SPP anak, juga buat beli kebutuhan dapur. Soalnya penghasilan suami kan nggak tentu.”* (wawancara, 2 Mei 2025)

Selain itu, warga juga menyampaikan bahwa penyaluran bantuan terbilang konsisten dari tahun ke tahun. Bahkan sejak tahun 2017, bantuan seperti BLT telah diterima secara rutin tanpa kendala yang berarti.

*“Saya udah pernah dapat sejak 2017. Alhamdulillah lancar, tiap ada program BLT selalu dipanggil dan nggak pernah ada masalah.”*  
(wawancara 2 mei 2025)

Dari pengakuan masyarakat tersebut, terlihat bahwa bantuan sosial berbasis Dana Desa memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan keluarga, terutama untuk kebutuhan mendasar seperti pendidikan anak dan konsumsi harian. Konsistensi penyaluran juga memberi rasa aman bagi warga yang mengandalkan bantuan tersebut di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.

Dengan ini juga Mas bima dari Karang Taruna Kalurahan guwosari menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah kalurahan terhadap kebutuhan dasar masyarakat melalui pemanfaatan Dana Desa. Sejalan dengan semangat pemberdayaan dan pembangunan yang inklusif, Karang Taruna melihat bahwa

pengalokasian Dana Desa untuk kebutuhan dasar sangat penting dan mendesak, mengingat hal ini berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup warga.

- Kebutuhan dasar yang dimaksud meliputi, antara lain:
- Akses air bersih dan sanitasi layak,
- Perbaikan fasilitas layanan kesehatan tingkat desa,
- Penyediaan fasilitas pendidikan informal dan keterampilan,
- Peningkatan ketahanan pangan dan gizi,

Serta dukungan bagi masyarakat rentan (lansia, disabilitas, dan keluarga miskin).

Karang Taruna mendukung agar Dana Desa digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan partisipatif. Kami juga siap berkolaborasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa, terutama yang berkaitan langsung dengan generasi muda dan pemberdayaan sosial.

Kami berharap ke depan, sinergi antara Karang Taruna, Pemerintah Kalurahan, serta seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat. Dengan demikian, Dana Desa benar-benar menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan.

Dalam pelaksanaan Dana Desa, keberadaan kelembagaan lokal menjadi bagian penting yang tidak bisa dilepaskan. Lembaga-lembaga seperti Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), LPMK, serta tokoh masyarakat dan pemuda memiliki posisi untuk ikut mengawal dan mengawasi jalannya program desa. Mereka turut terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa.

Kelembagaan lokal tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tapi juga menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Lewat

lembaga inilah berbagai aspirasi warga bisa disampaikan, didiskusikan, dan diteruskan dalam forum musyawarah desa. Dengan begitu, Dana Desa dapat digunakan sesuai kebutuhan yang nyata di masyarakat.

Selain itu, partisipasi kelembagaan juga mendukung transparansi dalam pengelolaan dana. Masyarakat dapat mengetahui bagaimana alur penggunaan Dana Desa melalui penjelasan dari lembaga yang mereka percaya. Proses ini ikut mendorong terciptanya keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah desa dalam menjalankan program-programnya.

Pemerintah desa secara rutin melibatkan kelembagaan dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Hal ini dilakukan agar kegiatan yang didanai Dana Desa benar-benar sesuai dengan harapan dan kebutuhan bersama. Sinergi antara kelembagaan dan pemerintah desa menjadi kunci penting keberhasilan program.

Secara umum, peran kelembagaan lokal menjadi bagian dari sistem pendukung dalam pelaksanaan Dana Desa. Fungsi mereka sebagai pengawas dan penghubung dengan masyarakat membuat proses pembangunan menjadi lebih partisipatif dan bertanggung jawab.

Carik Kalurahan Guwosari, Pak Nur Hidayah, menjelaskan bahwa dalam memastikan bantuan Dana Desa tepat sasaran, pihak pemerintah kalurahan selalu berusaha untuk mengakomodir usulan dari masyarakat. Namun, usulan tersebut tentu saja harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan yang ada di kalurahan.

*“Kami selalu mengakomodir usulan masyarakat selama itu sesuai dengan kriteria yang ada. Yang paling penting, kami memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak, seperti untuk infrastruktur yang sudah rusak atau program sosial untuk masyarakat yang membutuhkan.”*

Informan menambahkan bahwa proses ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa setiap dana yang disalurkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dengan demikian, keberlanjutan program juga lebih terjamin dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Dari penjelasan informan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Guwosari berfokus pada keadilan dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapannya. Carik menjelaskan bahwa pihak kalurahan selalu mengakomodir usulan dari masyarakat, namun tetap memperhatikan kriteria yang ada dan memprioritaskan kebutuhan yang dianggap paling mendesak, seperti infrastruktur yang rusak atau program sosial. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa dilakukan dengan memperhatikan kondisi riil di lapangan dan kebutuhan yang paling mendasar.

Dengan demikian, pemerintah kalurahan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat, sesuai dengan harapan warga dan kebutuhan yang teridentifikasi. Keberlanjutan dan relevansi program-program yang didanai oleh Dana Desa menjadi faktor kunci dalam memastikan pengelolaan dana yang tepat sasaran serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat.

Sementara itu, menurut penjelasan dari anggota BPD, peran mereka dalam pengawasan penggunaan Dana Desa sangatlah penting untuk memastikan agar dana

tersebut digunakan secara efektif dan sesuai dengan peruntukannya. Pengawasan ini dilakukan secara berkala, dengan jadwal 4 kali dalam setahun, yang sesuai dengan jadwal musyawarah desa (muskal) yang dilaksanakan di setiap tahapan pengelolaan Dana Desa.

*“BPD berperan dalam pengawasan yang rutin, kami mengikuti musyawarah kalurahan (muskal) mulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Anggaran Kalurahan (RPAL), sampai dengan monitoring dan evaluasi (Monev). Selain itu, kami juga turun langsung ke lapangan untuk memastikan apakah penerima bantuan benar-benar sesuai dengan sasaran atau tidak.”*

BPD juga menyatakan bahwa keberadaan mereka dalam proses Monev dan verifikasi langsung di lapangan membantu dalam meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana desa, serta memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan terkait pelaksanaan program yang ada.

Dari penjelasan anggota BPD, dapat disimpulkan bahwa peran BPD dalam pengawasan Dana Desa sangat signifikan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. BPD melakukan pengawasan rutin setiap tahun sebanyak empat kali, yang mencakup musyawarah kalurahan (muskal) untuk penyusunan Rencana Pembangunan Anggaran Kalurahan (RPAL), serta kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap implementasi program-program yang ada. Pengawasan ini dilakukan secara sistematis dan terjadwal, yang memungkinkan setiap tahapan pengelolaan dana dapat diawasi dengan baik.

Selain itu, BPD juga turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi keakuratan data penerima manfaat, memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan keterlibatan langsung dalam proses ini, BPD berperan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas,

dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD sangat penting untuk menjaga kualitas pelaksanaan dan pemanfaatan Dana Desa di kalurahan.

Pandangan masyarakat tentang pemanfaatan Dana Desa menjadi aspek yang tak kalah penting dalam proses pembangunan. Sebagai pihak yang merasakan langsung program-program desa, pengalaman dan tanggapan mereka bisa memberikan gambaran tentang bagaimana Dana Desa diterima dan dirasakan manfaatnya. Penilaian ini bisa menjadi masukan bagi perbaikan ke depan.

Masyarakat melihat Dana Desa sebagai salah satu sumber pembiayaan yang memberikan banyak perubahan di lingkungan mereka. Mulai dari pembangunan jalan, bantuan sosial, hingga kegiatan pelatihan, semuanya dirasakan memiliki manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Beberapa warga juga menganggap bahwa keberadaan Dana Desa membantu menyeimbangkan kesenjangan sosial di tingkat desa.

Kegiatan-kegiatan yang dijalankan melalui Dana Desa turut membentuk keterlibatan warga dalam pembangunan desa. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga mulai aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya berpartisipasi dalam pengelolaan dana publik.

Berbagai pandangan ini tentu bersifat beragam, tergantung dari latar belakang, lokasi tempat tinggal, dan keterlibatan warga dalam program desa. Namun, secara umum, masyarakat merespons positif adanya Dana Desa dan berharap program ini terus berjalan dengan perencanaan yang lebih baik lagi ke depan.

Mendengar dan memahami pengalaman masyarakat secara langsung akan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai efektivitas penggunaan Dana Desa. Karena itulah, masukan dari warga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam proses evaluasi dan pengambilan kebijakan di tingkat desa.

Beberapa masyarakat penerima manfaat yang diwawancarai mengungkapkan bahwa akses menuju fasilitas layanan kesehatan di Kalurahan Guwosari terbilang mudah dan dekat. Salah satu warga menyampaikan pengalamannya:

*“Kalau ke tempat pelayanan kesehatan itu ya gampang, mbak. Puskesmas pembantu atau posyandu ada di tengah kampung, dekat banget. Biasanya kita jalan kaki aja, nggak perlu naik motor.”*

Warga lainnya juga mengungkapkan bahwa kondisi jalan dan jarak ke tempat pelayanan kesehatan tidak menjadi kendala, bahkan saat membawa anak kecil atau orang tua:

*“Posyandu buat balita sama lansia itu dekat banget, jalan ke sana juga enak. Jadi pas ada pemeriksaan atau penyuluhan kesehatan, kita gampang ikut.”*

Akses yang mudah ini membuat warga merasa lebih terbuka untuk menggunakan layanan yang disediakan, terutama untuk kegiatan penyuluhan kesehatan, pemberian makanan tambahan, dan cek rutin kesehatan yang sering diadakan di balai padukuhan atau tempat layanan kesehatan terdekat.

Dari penuturan masyarakat penerima manfaat, dapat disimpulkan bahwa mereka merasakan dampak langsung yang positif dari berbagai bentuk bantuan yang bersumber dari Dana Desa. Bantuan seperti BLT, menurut warga, sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari biaya sekolah anak hingga keperluan sehari-hari. Seorang warga menyampaikan bahwa sejak tahun 2017,



bantuan tersebut selalu diterima tepat waktu, dan sejauh ini tidak pernah ada kendala berarti dalam proses pencairannya.

Dari sisi prosedur, masyarakat merasa tidak kesulitan mengikuti alur pencairan bantuan. Mereka menjelaskan bahwa prosesnya diawali dengan undangan dari dukuh, kemudian dilakukan verifikasi data, dan setelah dinyatakan sesuai kriteria, mereka mendapatkan jadwal pencairan. Proses ini dinilai terbuka dan tidak menyulitkan, bahkan sudah menjadi rutinitas tahunan yang dimengerti oleh warga.

Selain itu, masyarakat juga menyatakan bahwa akses terhadap layanan kesehatan cukup mudah. Lokasi posyandu, balai padukuhan, maupun fasilitas kesehatan lainnya umumnya berada di tengah pemukiman, sehingga dapat dijangkau dengan berjalan kaki. Kondisi jalan yang sudah baik juga mendukung kemudahan tersebut. Hal ini mendorong masyarakat untuk aktif mengikuti kegiatan seperti penyuluhan kesehatan, posyandu balita dan lansia, serta pemberian makanan tambahan, karena semuanya terasa dekat dan bisa diakses tanpa kendala.

Secara keseluruhan, pengalaman masyarakat menunjukkan bahwa program Dana Desa, khususnya di Kalurahan Guwosari, dapat dirasakan manfaatnya secara nyata. Mulai dari prosedur penerimaan yang jelas, bantuan yang konsisten, hingga akses layanan yang mudah, semua itu membuat warga merasa terbantu dan dihargai oleh pemerintah kalurahan.

Maka dari itu saya selaku peneliti dapat menyimpulkan dari berbagai pihak yang telah saya wawancara Penggunaan Dana Desa tahun 2024 di Kalurahan Guwosari menunjukkan perhatian yang besar terhadap pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat miskin melalui berbagai bentuk bantuan sosial. Program utama yang dijalankan adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada warga miskin dan rentan secara berkala, hingga empat kali dalam setahun. Penyaluran dilakukan berdasarkan hasil musyawarah desa, dengan proses verifikasi yang terbuka dan partisipatif. Warga penerima manfaat menyatakan bahwa bantuan ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok, seperti pendidikan anak dan konsumsi rumah tangga, serta telah berjalan secara konsisten sejak tahun 2017.

Selain BLT, Dana Desa juga digunakan untuk mendukung program ketahanan pangan berbasis pemberdayaan, seperti bantuan ternak dan pembagian bibit tanaman melalui kelompok wanita tani (KWT). Program ini ditujukan untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat miskin yang mau bekerja dan berusaha. Pemerintah kalurahan melibatkan berbagai elemen seperti Karang Taruna, BPD, LPMK, dan tokoh masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, untuk memastikan akuntabilitas serta penggunaan dana yang tepat sasaran dan transparan.

Dari pengalaman dan tanggapan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa Dana Desa di Kalurahan Guwosari telah memberikan dampak nyata bagi kehidupan warga, khususnya dalam mendukung kesejahteraan dan ketahanan sosial ekonomi. Akses yang mudah terhadap layanan kesehatan, prosedur bantuan yang jelas, serta keterlibatan masyarakat dan kelembagaan lokal yang aktif, menjadi kunci keberhasilan program. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan desa tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga menjawab kebutuhan dasar dan memperkuat rasa keadilan sosial di tingkat lokal.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti mendapatkan informasi dari informan terkait yang diwawancarai. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah kalurahan (Carik), BPD, maupun masyarakat penerima manfaat, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Dana Desa di Kalurahan Guwosari tahun 2024 telah diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dana Desa dimanfaatkan secara nyata untuk berbagai bidang, mulai dari kesehatan, bantuan sosial, hingga penguatan lembaga dan pemberdayaan masyarakat.

#### **1. Penggunaan dana desa untuk kebutuhan dasar pada bidang kesehatan**

Dalam bidang kesehatan, penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti penyuluhan stunting, penyemprotan nyamuk, pemberian makanan tambahan bagi balita dan lansia, hingga program jambanisasi dan PUSKESOS. Kegiatan tersebut bukan hanya membantu secara fisik, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat. Selain melibatkan tenaga kesehatan dan kader lokal, kegiatan ini juga difokuskan pada pencegahan penyakit dan peningkatan gizi masyarakat. Meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan tenaga medis dan rendahnya partisipasi beberapa kelompok masyarakat, secara umum Dana Desa telah berhasil mendukung pembangunan kesehatan yang partisipatif dan menyentuh kebutuhan riil warga.

## **2. Penggunaan dana desa untuk penanggulangan masyarakat miskin**

Di sisi bantuan sosial, masyarakat mengakui bahwa program BLT Dana Desa sangat membantu, terutama dalam memenuhi kebutuhan harian dan biaya pendidikan anak. Proses penyalurannya yang teratur dan tidak menyulitkan menambah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Selain itu, akses terhadap pelayanan kesehatan juga mudah dijangkau oleh warga, yang menunjukkan bahwa lokasi dan infrastruktur penunjang sudah memadai.

Peran kelembagaan lokal juga cukup kuat. Pemerintah kalurahan dan BPD menjalankan peran mereka secara aktif, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Usulan masyarakat diakomodasi, dan BPD turut melakukan pemantauan agar program benar-benar menyasar mereka yang berhak. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola Dana Desa berjalan cukup baik dan partisipatif.

Dari sisi masyarakat, mereka tidak hanya merasa terbantu secara ekonomi, tetapi juga merasa lebih dekat dengan layanan dasar yang selama ini mereka butuhkan. Pengalaman warga menunjukkan bahwa Dana Desa telah menyentuh aspek keseharian mereka dengan nyata dan positif. Maka dapat dikatakan bahwa penggunaan Dana Desa di Kalurahan Guwosari pada tahun 2024 telah memberikan manfaat langsung bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai penggunaan Dana Desa tahun 2024 di Kalurahan Guwosari, masih terdapat beberapa hal yang perlu

menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas program di masa mendatang. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah kalurahan dan pihak terkait agar pelaksanaan Dana Desa ke depan semakin tepat sasaran, merata, dan berkelanjutan. Adapun saran tersebut sebagai berikut :

1. Perlu Pemerataan Program Jambanisasi dan Perbaikan Sanitasi

Meskipun telah dilakukan renovasi jamban yang tidak layak, cakupan program jambanisasi masih terbatas. Pemerintah kalurahan disarankan untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap rumah tangga yang belum memiliki jamban layak, agar program ini tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif dalam menjaga kesehatan lingkungan.

2. Perluasan Peran Puskesmas agar Lebih Dikenal Masyarakat

Meskipun sudah disebutkan adanya Puskesmas, masih sedikit masyarakat yang mengetahui peran dan fungsi layanan ini. Disarankan agar kalurahan meningkatkan sosialisasi dan publikasi tentang keberadaan Puskesmas, termasuk bagaimana masyarakat bisa mengaksesnya, supaya benar-benar berfungsi sebagai jembatan layanan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adzam, Muh, Hanna Usnitayati, Afrian Arga Prastya, Naufal Afaf Bernantus, and Alfarid S. Lamora. 2024. "Analisis Kebijakan Fiskal Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Dana Desa: Kajian Literatur." *Public Service and Governance Journal* 5 (2): 101–11. <https://doi.org/10.56444/psgj.v5i2.1471>.
- Guwosari, Kalurahan. 2013. "Profil Kalurahan Guwosari." *Sistem Informasi Kalurahan Guwosari*, 1. <https://sid.guwosari.desa.id/artikel/2013/7/29/profil-kalurahan-guwosari>.
- Indonesia, Presiden Republik. 2024. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Peraturan .Bpk.Go.Id*, 31. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>.
- Kitthananan, Amornsak. 2006. "Conceptualising Governance." *Thai Journal of Public Administration* 4 (1): 23–46.
- Mardhotillah, Annida, R Ricky Firmansyah, Debby Sisilia, Heppy Septiawan, Isya' Sya'bana, Suhirman, and Adenantera Dwicaksono. 2024. "Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Desa Citali Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang)." *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 15 (1): 25–39.
- Marekan, Marekan, and Teguh Ansori. 2019. "Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Study Di Desa Galak Kec. Slahung Kab. Ponorogo." *Journal of Community Development and Disaster Management* 1 (2): 117–28. <https://doi.org/10.37680/jcd.v1i2.743>.
- Nasir, Mohammad, M. Bahri Ghazali, and Fitri Yanti. 2023. "Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa Melalui Pengembangan Masyarakat Islam Di Kabupaten Pringsewu Lampung." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 15 (2): 191–212. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v15i2.11331>

## **PANDUAN WAWANCARA**

Nama Informan :

Jabatan/Pekerjaan :

Usia :

Tingkat Pendidikan :

Jenis Kelamin :

Tanggal Wawancara :

---

---

### Daftar Pertanyaan

1. Apa saja program utama yang didanai melalui Dana Desa pada tahun 2024?
2. Bagaimana desa menentukan prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk kebutuhan dasar?
3. Program apa saja yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan menggunakan Dana Desa?
4. Apakah ada pembangunan atau renovasi fasilitas kesehatan di Kalurahan Guwosari?
5. Bagaimana program Dana Desa mendukung tenaga medis dan layanan kesehatan bagi masyarakat?
6. Apakah ada program penyuluhan kesehatan atau pencegahan stunting di desa?
7. Program apa saja yang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin?
8. Bagaimana sistem pengawasan agar bantuan tepat sasaran?
9. Bagaimana peran BPD dalam perencanaan dan pengawasan Dana Desa, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat?
10. Bagaimana pengalaman Anda dalam mengakses layanan kesehatan yang didanai Dana Desa?
11. Apakah Anda pernah menerima bantuan sosial dari Dana Desa? Jika ya, bagaimana prosesnya?
12. Apakah bantuan tersebut benar-benar membantu kebutuhan Anda?

**LAMPIRAN**  
**DOKUMENTASI INFORMAN**



Wawancara dengan Carik kalurahan Guwosari





Wawancara dengan BPD kalurahan Guwosari



Wawancara dengan dukuh guwosari



Wawancara dengan Rt



Wawancara dengan kader posyandu



Wawancara dengan karang taruna 1



Wawancara dengan Karang taruna 2



Wawancara dengan penerima manfaat



Wawancara dengan ibu pkk





**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA**  
**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**  
**YOGYAKARTA**  
**Akreditasi Institusi B**

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225. Telp. (0274) 501971, 550775, Fax. (0274) 515089, website: [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id), e-mail: [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

Nomor : 239/I/U/2025

Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :  
Lurah Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul  
Di tempat.

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana ( S1 ) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Ray Pratama Umbu Kora Djaga Uma  
No Mhs : 21520043  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Penggunaan Dana Desa 2024 untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kalurahan Guwosari  
Tempat : Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul  
Dosen Pembimbing : Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 11 April 2025  
Ketua  
  
Dr. Sutoro Eko Yunanto  
NIP. 170 230 190



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA  
Akreditasi Institusi B**

• JUDUL PENELITIAN DAN RUMAH KULTUR DESA, PROGRAM STUDI DESA, STAF DAN PERAKSI/STAF B  
• JUDUL PENELITIAN DAN RUMAH KULTUR DESA, PROGRAM STUDI DESA, STAF DAN PERAKSI/STAF B

• PROGRAM STUDI DESA, RUMAH KULTUR DESA, PROGRAM STUDI DESA, STAF DAN PERAKSI/STAF B  
• PROGRAM STUDI DESA, RUMAH KULTUR DESA, PROGRAM STUDI DESA, STAF DAN PERAKSI/STAF B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id), e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)


**SURAT TUGAS**  
Nomor : 128/I/1/2025

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Ray Pratama Umbu Kora Djaga Uma  
Nomor Mahasiswa : 21520043  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.  
Jenjang : Sarjana (S-1).  
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.  
a. Tempat : Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul  
b. Sasaran : Penggunaan Dana Desa 2024 untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kalurahan Guwosari  
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 11 April 2025

Ketua  
  
Dr. Sutardjo Eko Yunanto  
170 230 190

**PERHATIAN :**

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

**MENGETAHUI :**

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON PAJANGAN  
KALURAHAN GUWOSARI  
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦗꦁꦤꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦒꦸꦮꦺꦴꦱꦂꦶ

Jl. Guwosari Raya Iroyudan Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul,  
Telp/WA 0274 6461041 Kode Pos 55751 Website [guwosari.desa.id](http://guwosari.desa.id)  
e-mail [dasz.guwosari@bantulkab.go.id](mailto:dasz.guwosari@bantulkab.go.id)

SURAT IZIN

Nomor:400.14.5.4/133

Memperhatikan: Surat dari : STPMD APMD YOGYAKARTA  
Nomor : 239/IIJ/2025  
Tanggal : 11 April 2025  
Perihal : Izin Penelitian

Pemerintah Kalurahan Guwosari memberikan izin kepada:

1. Nama : RAY PRATAMA UMBU KORA DJAGA UMA
2. No. Mahasiswa : 21520043
3. Program Studi : Ilmu Pemerintahan
4. No. HP : 0821-4652-2137

Untuk melaksanakan Izin penelitian dengan rincian sebagai berikut:

- a. Judul : Penggunaan Dana Desa 2024 untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kalurahan Guwosari
- b. Lokasi : Kalurahan Guwosari
- c. Waktu Izin : 28 April - 28 Mei 2025
- d. Status Izin : Baru

Ketentuan yang harus ditaati:

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib memenuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya diberikan untuk kegiatan sesuai izin yang diajukan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *hardcopy* (*hardcover*) dan *softcopy* (*CD*) kepada Pemerintah Kalurahan Guwosari setelah selesai melaksanakan kegiatan;
7. Izin dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Guwosari, 28 April 2025





SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
STATUS TERAKREDITAS A (SK BAN-PT No.3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775 Fax. (0274) 515989

Nomor : 134/PEM/J/X/2024

H a l : Penunjukan Dosen  
Pembimbingan Skripsi

K e p a d a :

Dra. B. Hari Saptaning Tyas., M.Si

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi  
Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	: Ray Pratama U.K Djaga Uma
No. Mahasiswa	: 21520043
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul	: 7 November 2024

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 7 November 2024  
Ketua Program Studi  
  
Dr. Gusdonus Sahdan., M.A.  






SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
STATUS TERAKREDITASI (SK BAN-PT No. 003/BAN-PT/Ak-XIII/S1/V/2010)

Jl. Tiroho 317, Tolo, (0274) 561971; Fax. (0274) 516989 - Yogyakarta 55225

**KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama** : Ray pertama umbu kota Daga uma  
**No Mahasiswa** : 21520043  
**Judul Skripsi** : penggunaan dana desa 2014 untuk p.k.p. kulawa  
Gulowari  
**Dosen Pembimbing** : Dra. B. Hari Septaning Tyas, M. Si.  
**Mulai Bimbingan** : 12 November 2024

Tanggal	Uraikan Perbaikan	Paraf Dosen Pembimbing
12/11.24	1. Baca referensi / buku / jurnal tentang dgn judul 1. Infrastruktur 2. Dana Desa → Persepsi 2022, 2023 & 2024.	f
10/1-25	2. ke lokasi - Info 3. tgl 19 ke Persepsi - New judul - Uraian / baca Persepsi 7/2023 - Buat draft Prop lengkap.	f
13/3.24	- L. B. M. + Kbtu Dsr - Fokus - R. Msl. - L. R. - k. konsep - M. Pa } diperbaiki lagi	f

## Surat Bukti Hasil Cek Turnitin

revisi fix 8 ray.docx

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

sriharjo.bantulkab.go.id

Internet Source

3%

2

tirtomulyo-bantul.desa.id

Internet Source

3%

3

repo.apmd.ac.id

Internet Source

1%

4

jdi.bantulkab.go.id

Internet Source

1%

5

Rahmatullah, Mamat. "Rekonstruksi Regulasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pembangunan Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

1%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 1%

Exclude bibliography

On